

**PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SELOMANGLENG KOTA**

**KEDIRI**

**OLEH BAPPEKO DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN**

**ASLI DAERAH**

(Studi di BAPPEKO Kediri)

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian syarat- syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam Ilmu Hukum

Oleh

**MARTHA YANU RAHMAWAN**

0310103113



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Keberadaan dan Fungsi Unit Perencanaan dalam Pembangunan .....	13
1. Konsepsi Pembangunan .....	13
2. Perencanaan Pembangunan .....	17
3. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	23
4. Organisasi yang Mengelola Perencanaan .....	27
5. Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah .....	29
B. Pengembangan Wisata .....	36
1. Perlunya Daerah Wisata Dikembangkan .....	36
2. Prinsip-prinsip Pengembangan Wisata .....	38
3. Kendala-kendala Pengembangan Wisata .....	39
4. Strategi Pengembangan Wisata .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian .....	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48

E. Sumber Data .....	49
F. Instrumen Penelitian .....	50
G. Analisis Data .....	50
H. Sistematika Pembahasan .....	52

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	55
1. Sejarah Singkat Kota Kediri .....	55
a. Kediri Jaman Kerajaan .....	55
b. Kediri Jaman Penjajahan .....	59
2. Potensi Pariwisata Kota Kediri .....	64
a. Usaha-usaha Pengembangan Sektor Pariwisata .....	65
b. Kawasan Wisata Selomangleng .....	66
c. Taman Wisata Tirtoyoso dan Pagora .....	66
d. Kawasan Wisata Industri .....	67
e. Kawasan Wisata Pusat Perbelanjaan .....	67
3. Keadaan Geografis dan Administratif .....	67
4. Keadaan Topografi .....	68
5. Keadaan Demografi .....	69
6. Keadaan Perekonomian .....	71
7. Keadaan Sosial Budaya .....	72
B. Peranan BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Kota Kediri .....	73
1. Sekilas Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kediri .....	73
a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEKO .....	73
b. Struktur Organisasi .....	75
c. Kelompok Jabatan Fungsional .....	79
2. Sekilas Tentang Kawasan Wisata Selomangleng .....	81
3. Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	83
a. Peranan BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	83
b. Pertimbangan-Pertimbangan yang Dipakai BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	99

c. Strategi-strategi yang Dilakukan BAPPEKO Dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.....	108
4. Faktor Penghambat dan Solusi Yang Dilakukan BAPPEKO dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	111
a. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	111
b. Obyek Wisata yang Ada di Kawasan Wisata Selomangleng .....	117
c. Obyek Wisata Alam .....	117
d. Obyek Wisata Budaya .....	118
e. Obyek Wisata Minat Khusus Taman Wisata Selomangleng .....	125
5. Potensi Pariwisata Kota Kediri .....	125
a. Upaya BAPPEKO Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng .....	127
C. Kaitan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Kota Kediri Dengan Peningkatan PAD .....	129
1. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Sebelum Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.....	131
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Setelah Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.....	132
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk itu pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dinyatakan bahwa pembangunan Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dimana untuk mewujudkan dilaksanakanlah suatu kegiatan yang terencana dan terarah. Bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa lain yang sedang berkembang, sedang melaksanakan pembangunan yang pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu pembangunan bangsa (*nation building*) dan adanya kemajuan sosial ekonomi (*social economic progress*) masyarakat. Tujuan itu pula yang hendak dicapai bangsa Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sehingga pada dasarnya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dimasa yang

akan datang adalah merupakan pekerjaan besar karena sifatnya multi dimensional. Untuk mencapai tujuan itu memerlukan pemikiran yang matang melalui program-program yang rinci dan bertahap.

Sejak reformasi bergulir di negara kita, telah terjadi berbagai perubahan dan tuntutan dari berbagai macam pihak, sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Melihat semakin besarnya tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu diadakan otonomi daerah. Selain sebagai salah satu wujud penerapan prinsip demokrasi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam pembangunan dan mendayagunakan semua potensi daerah yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Otonomi daerah dilaksanakan atas dasar asas desentralisasi yaitu, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab yang diberikan kepada daerah secara proporsional di wujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut dilaksanakan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar membangun kekuatan daerah untuk memperkuat Republik Indonesia secara nasional. Oleh karena itu dibutuhkan adanya usaha untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Otonomi daerah dipandang sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengembangkan kemampuan manajerial mereka. Otonomi daerah pada hakekatnya juga merupakan usaha pendekatan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan disyahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi kali ini lebih memberi keleluasan bagi pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan harapan masyarakat dan kebutuhannya dapat lebih di jangkau oleh pemerintah melalui pemerintah daerah.

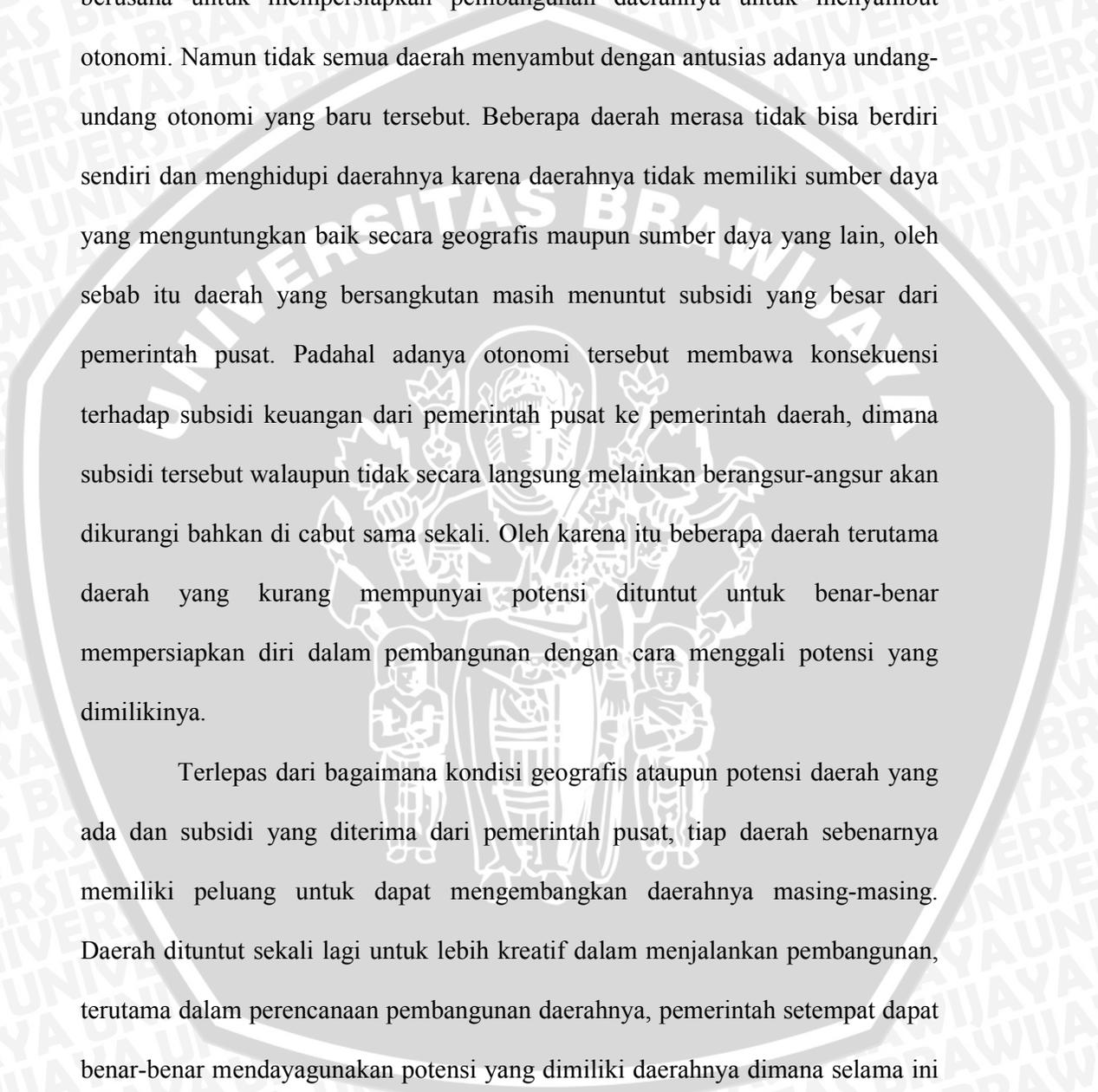
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini memberikan otonomi secara utuh kepada kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi

repository.ub.ac

pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai *stimulator, fasilitator, coordinator dan entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut masing-masing daerah berusaha untuk mempersiapkan pembangunan daerahnya untuk menyambut otonomi. Namun tidak semua daerah menyambut dengan antusias adanya undang-undang otonomi yang baru tersebut. Beberapa daerah merasa tidak bisa berdiri sendiri dan menghidupi daerahnya karena daerahnya tidak memiliki sumber daya yang menguntungkan baik secara geografis maupun sumber daya yang lain, oleh sebab itu daerah yang bersangkutan masih menuntut subsidi yang besar dari pemerintah pusat. Padahal adanya otonomi tersebut membawa konsekuensi terhadap subsidi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana subsidi tersebut walaupun tidak secara langsung melainkan berangsur-angsur akan dikurangi bahkan di cabut sama sekali. Oleh karena itu beberapa daerah terutama daerah yang kurang mempunyai potensi dituntut untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimilikinya.

Terlepas dari bagaimana kondisi geografis ataupun potensi daerah yang ada dan subsidi yang diterima dari pemerintah pusat, tiap daerah sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Daerah dituntut sekali lagi untuk lebih kreatif dalam menjalankan pembangunan, terutama dalam perencanaan pembangunan daerahnya, pemerintah setempat dapat benar-benar mendayagunakan potensi yang dimiliki daerahnya dimana selama ini belum dimanfaatkan sama sekali, dengan kata lain dituntut adanya perencanaan yang baik dalam menjalankan pembangunan untuk menyambut otonomi daerah.



repository.ub.ac

Fungsi mendasar yang bisa pemerintah daerah dapatkan dengan menyusun suatu perencanaan yang baik antara lain:

1. Untuk penggunaan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien
2. Keperluan untuk mendobrak kearah perubahan struktural, ekonomi dan sosial masyarakat
3. Arah perkembangan untuk kepentingan keadilan social.<sup>1</sup>

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mengembangkan potensi yang ada.<sup>2</sup>

Perencanaan dalam pembangunan merupakan suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan, hal tersebut menimbulkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan dalam pembangunan yaitu:

1. Dengan adanya perencanaan yang diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui;
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*The Best Alternative*) kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*The Best Combination*);

<sup>1</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Hlm 8.

<sup>2</sup> Kartasasmita, G. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 22.

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya;
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standart untuk mengadakan pengawasan/ evaluasi (*control/ evaluation*).<sup>3</sup>

Dari berbagai pendapat yang menguatkan pentingnya perencanaan dalam pembangunan, maka diperlukan dukungan untuk terciptanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas. Perencanaan yang berjalan selama ini sering kali adalah perencanaan yang terpusat tanpa lebih jauh lagi melihat keadaan sasaran pembangunan atau pihak yang akan menerima imbas atau dampak dari perencanaan pembangunan yang telah disusun ataupun sudah dilaksanakan. Perencanaan yang ada seringkali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga perencanaan menjadi sia-sia dan berdampak negatif di masa yang akan datang, padahal sudah menjadi suatu tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk menjamin bahwa pembangunan:

1. Menguntungkan masyarakat;
2. Dipahami maksudnya oleh masyarakat;
3. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Dengan tuntutan untuk dapat menyusun perencanaan yang baik dalam pembangunan maka dibutuhkan suatu kelembagaan untuk dapat mengkoordinasikan penyusunan perencanaan serta segala *follow up* yang diperlukan. Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam mengatur

---

<sup>3</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 9.

<sup>4</sup> Kartasmita, G. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 27

kegiatan organisasi secara efektif dan efisien mempunyai peranan yang sangat penting disamping fungsi lain yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Koordinasi diperlukan agar tiap-tiap bagian yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dilakukan dengan selaras dan serasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan dalam waktu dan perlengkapan pekerjaan. Dalam era pembangunan sekarang ini, koordinasi mempunyai arti yang lebih penting lagi. Terutama diantara aparatur pemerintahan, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih daripada satu instansi pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan program yang demikian itu pada tingkat yang dominan ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang bersangkutan.

Lembaga yang bertugas untuk perencanaan pembangunan adalah Bappenas untuk tingkat nasional, sedangkan ditingkat kota dilakukan oleh BAPPEKO. BAPPEKO sebagai penyusun arah dan pedoman perencanaan pembangunan kota merupakan lembaga yang tepat dan sudah seharusnya bertindak sebagai perencana dalam perencanaan pembangunan. BAPPEKO adalah Badan Perencanaan Kota yang berada di wilayah kota untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan.

Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Kota, BAPPEKO mempunyai fungsi diantaranya adalah menyusun pola dasar pembangunan yang terdiri dari pola pembangunan umum jangka panjang dan pola pembangunan umum jangka pendek, melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, dan instansi-instansi vertikal, melaksanakan koordiansi dan atau penelitian untuk kepentingan

perencanaan, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk perencanaan pembangunan lebih lanjut, memonitor pelaksanaan pembangunan dan melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk gubernur.

Dalam rangka menyambut otonomi daerah BAPPEKO Kediri mempunyai peran besar sebagai perencana dalam perencanaan tata kota Kediri. Meskipun Kediri merupakan kota kecil tetapi Kediri mempunyai potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan daerah lain. Pemerintah Kota Kediri mulai berbenah diri melalui pembangunan dan pengembangan semua potensi secara maksimal. Dengan semangat pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Kota Kediri, melalui konsep Tribina Cita Kota, jajaran top management kota ini memprioritaskan pembangunannya pada sektor industri, perdagangan, dan pendidikan. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga berupaya untuk menciptakan peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melalui pengembangan sektor pariwisata salah satunya pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.

Kawasan Wisata Selomangleng Kediri memiliki prospek ekonomi yang cukup bagus untuk dikembangkan. Keberadaannya bisa menjadi primadona pariwisata daerah dan nasional bilamana penanganannya senantiasa mempertimbangkan kaidah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dalam kaitan ini harus diartikan sebagai upaya meminimalkan setiap sumber daya yang akan dialokasikan. Kiranya sumber daya yang dimaksud dalam kaitan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Kediri adalah yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pada kawasan tersebut

maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola sarana wisata yang dioperasionalkan.<sup>5</sup>

Sedangkan Sumber Daya Alam (SDA) disini harus diartikan sebagai upaya penyediaan lahan yang pengalokasiannya diperuntukkan bagi pembangunan kawasan wisata dengan pola area. Pembangunan dengan sistem area pada suatu wilayah pengembangan seperti halnya yang akan diterapkan pada Kawasan Wisata Selomangleng sangat memberikan peluang bagi pencapaian harapan mewujudkan ketersediaan obyek wisata yang representatif. Dengan sistem area ini, publik pemilik modal ataupun investor dapat dengan leluasa memilih jenis kegiatan apa yang sekiranya cocok dengan insting bisnisnya.

Kawasan Wisata Selomangleng ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kediri melalui BAPPEKO yang berperan sebagai perencana berusaha mengembangkan wisata ini dengan membangun berbagai sarana, prasarana serta fasilitas yang dapat meningkatkan daya jual Kawasan Wisata Selomangleng. Diantaranya hal ini dilakukan dengan membangun kolam renang dan area tempat bermain anak. Dimana masyarakat Kediri tidak perlu jauh-jauh ke luar kota untuk sekedar rekreasi atau tamasya keluarga karena semua sudah tersedia di kawasan ini. Di samping itu setiap Hari Minggu ditampilkan kesenian khas wisata kota Kediri seperti jaranan, wayang, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja setiap Hari Minggu juga diadakan senam sehat yang dapat diikuti oleh semua masyarakat Kediri tanpa dipungut biaya apapun. Jadi disamping berwisata kita juga dapat berolahraga.

Dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini maka BAPPEKO mempunyai peranan yang sangat penting terutama melalui perencanaan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau

---

<sup>5</sup> ([www.kotakediri.go.id](http://www.kotakediri.go.id)). 31 Maret 2008

kebutuhan pembangunan. Sehingga dengan adanya pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng di harapkan kawasan ini dapat menjadi salah satu andalan wisata Kota Kediri yang dapat menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil Judul mengenai **"PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SELOMANGLENG KOTA KEDIRI OLEH BAPPEKO DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI"**(studi di BAPPEKO Kota Kediri).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan BAPPEKO dalam pengembangan kawasan wisata selomangleng Kota Kediri?
2. Bagaimana kaitan pengembangan kawasan wisata selomangleng terhadap peningkatan PAD kota Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng oleh BAPPEKO dalam peningkatan PAD
2. Untuk mengetahui peningkatan PAD kota Kediri sebelum dan setelah pengembangan kawasan wisata selomangleng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

- b. Sebagai referensi ilmiah untuk menunjang proses belajar mengajar bagi segenap civitas akademika khususnya di fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

1. Menjadi bahan pertimbangan untuk BAPPEKO sebagai perencana dalam pengembangan wisata di Kota Kediri
2. Menjadi bahan masukan serta informasi bagi peneliti dalam penelitian lebih lanjut.

### b. Bagi Masyarakat / Dinas Pariwisata Sosial dan Budaya

1. Bagi masyarakat pada umumnya penulisan ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai perencana dalam pengembangan wisata di Kota Kediri
2. Bagi Dinas Pariwisata Sosial dan Budaya dapat digunakan sebagai peningkatan PAD kota Kediri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Keberadaan dan Fungsi Unit Perencanaan dalam Pembangunan**

##### **1. Konsepsi Pembangunan**

###### a. Definisi Pembangunan

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung arti:

1. Bangun dalam arti sadar/ siuman (aspek fisiologi)

2. Bangun dalam arti bangkit/ berdiri sendiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi)
4. Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk).  
Sedangkan secara ensiklopedik dianalogikan dengan konsep pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan social, pembebasan, pambauran, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, pembangunan, pengembangan dan pembinaan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Bryant and white definisi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri (*sustainability*)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling

---

<sup>6</sup> Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang Hlm. 26

menguntungkan (simbiosis mutualisme) dan saling menghormati (interdependensi).<sup>7</sup>

Hakekat dari pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipatif aktif menurut tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Selain itu pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana yang dilakukan secara terus menerus di berbagai aspek untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

#### b. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan menurut Djamin ada 3, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaannya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rokhani)
3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perseorangan dan bangsa dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.<sup>8</sup>

#### c. Unsur-unsur Pembangunan

<sup>7</sup> Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang. Hlm. 37

<sup>8</sup> Djamin, Zulkarnain. 1984. *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sejak Pelita I)*. Jakarta. Hlm. 9

Didalam pelaksanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pembangunan yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Proses, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus.
2. Sadar, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.
3. Berencana, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Modernitas, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
5. Multi-dimensional, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
6. *Nation Building*, bahwa kesemua hal tersebut diatas ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana yang

---

<sup>9</sup> Sondang, P. Siagian. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Halm. 3-4

mengarah pada modernitas dan bersifat multi-dimensional yang bertujuan untuk membina bangsa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Ciri-ciri Pembangunan

Tjokrowinoto menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan priode waktu) yang dasarnya tidak jelas, dengan ciri-ciri pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar dan terencana.
3. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bebas nilai.
4. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembangunan menyangkut suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menuju ke arah masa depan yang lebih baik.

## 2. Perencanaan Pembangunan

a. Definisi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dalam pembangunan sangat penting dalam mewujudkan suatu pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Perencanaan dianggap sebagai alat “pembangunan”, karena perencanaan memang memerlukan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi *target group* (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan.

---

<sup>10</sup> Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta.

Albert waterstone menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.<sup>11</sup>

Selain itu Waterstone sebagaimana dikutip oleh Coralie Bryant kembali mengemukakan pendapat mengenai perencanaan pembangunan melalui dua petunjuk arah perencanaan tersebut, yaitu:

1. Perencanaan mencakup penghematan sumber-sumber daya langka oleh otoritas yang dibentuk masyarakat.
2. Perencanaan harus mencakup upaya-upaya yang terorganisasi sadar dan kontinu untuk menemukan alternatif-alternatif terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan khusus.<sup>12</sup>

Selanjutnya Bintoro sendiri menyebutkan perencanaan pembangunan sebagai suatu pengerahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi, yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Sedangkan Widjaja Nitisastro mengemukakan pendapatnya mengenai perencanaan pembangunan sebagai berikut:

“Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan

<sup>11</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 12.

<sup>12</sup> Bryant, Coralie dan White Louis. 1999. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta. Hlm. 306.

tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran tertentu yang lebih dahulu harus dipilih pula”<sup>13</sup>

Disisi lain perencanaan pembangunan dipandang dalam konsep administrasi pembangunan yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses administrasi pembangunan itu sendiri disebut sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan bangsa”<sup>14</sup>

Selanjutnya Soekartawi mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan sebagai:

“Suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah di tetapkan untuk masa mendatang”<sup>15</sup>

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu proses pemikiran dan penentuan serta pengarahan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang akan datang.

#### b. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

<sup>13</sup> Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta. Hlm. 76.

<sup>14</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta.. Hlm. 33.

<sup>15</sup> Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 78.

Ciri-ciri perencanaan pembangunan biasanya berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Berikut ini adalah ciri-ciri utama perencanaan pembangunan:

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*)
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4. Ciri yang keempat yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja.
5. Ciri lain daripada suatu perencanaan pembangunan, yang menjadi kecenderungan, setelah tahun 1960-an, adalah usaha pemerataan pembangunan.
6. Ciri lain dari perencanaan pembangunan adalah adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Ciri lain daripada perencanaan pembangunan adalah usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
8. Ciri suatu perencanaan lainnya adalah terdapatnya usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi
9. Sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ ideal atau bersifat jangka panjang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 49-52.

Pada dasarnya ciri-ciri perencanaan pembangunan merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mengadakan perubahan serta perbaikan-perbaikan pada beberapa aspek kehidupan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Unsur-unsur dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam suatu perencanaan pembangunan terdapat berbagai unsur-unsur pokok. Secara umum unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas-prioritas pembangunan.
2. Unsur pokok yang kedua adalah kerangka rencana. Seringkali hal ini disebut juga sebagai kerangka makro rencana.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur pokok dalam penyusunan rencana pembangunan.
4. Unsur pokok perencanaan pembangunan yang lain dalam perencanaan pembangunan adalah uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
5. Unsur pokok kelima daripada perencanaan pembangunan adalah program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain.
6. Unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Hlm. 63-65.

repository.ub.ac

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pembangunan meliputi kerangka perencanaan yang menyangkut mengenai tujuan, arah dan prioritas-prioritas pembangunan yang ingin dicapai, serta sumber-sumber pembangunan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang akan dilakukan.

### 3. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Definisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area/ wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah. Riyadi dan Bratakusumah mengemukakan pendapatnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan/mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas”<sup>18</sup>

Berarti perencanaan pembangunan daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan sektor swasta dan

---

<sup>18</sup> Riyadi dan Bratakusumah, Dedy Supryady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Hlm. 7.

pemanfaatan potensi dan sumber daya tersebut secara maksimal dalam upaya menambah nilai daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah, daerah dalam jangka waktu tertentu.

b. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Ateng Syafrudin mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintah daerah harus secara aktif merencanakan pembangunan daerah, karena:

1. Membantu pemerintah pusat pada waktu yang sama mengemukakan pendapat dan meneliti proyek-proyek yang akan dilaksanakan di daerah tersebut
2. Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan selanjutnya menciptakan administrasi yang lebih efisien
3. Untuk memberikan informasi kepada sektor swasta sehingga kegiatan-kegiatan mereka dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan sumbangan yang maksimal, terutama terhadap pembangunan sosial ekonomi<sup>19</sup>

Dengan demikian, pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui keadaan riil daerahnya dari pada pemerintah pusat, pengetahuan pemerintah pusat tentang daerah-daerah terutama daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan sangat terbatas. Selain itu permasalahan pembangunan di daerah

---

<sup>19</sup> Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 40.

yang membutuhkan penanganan cepat dapat lebih segera ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki jumlah permasalahan yang relatif sedikit daripada pemerintah pusat. Ateng Syafrudin juga menambahkan bahwa, perencanaan pembangunan yang terpusat memiliki sejumlah kelemahan sebagai berikut:

1. Kurang mantapnya perencanaan yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pembagian tugas dan kewenangan
2. Organisasi pelaksanaan yang kurang efisien
3. Kekurangan informasi mengenai potensi daerah dan kendala-kendala dalam menggali serta memanfaatkannya
4. Alokasi sumber berbagai daerah penyebarannya menimbulkan anggapan kurang adil bagi daerah tertentu<sup>20</sup>

c. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan daerah pada umumnya disusun dalam bentuk umum dan untuk jangka waktu panjang bagi suatu daerah. Dari bentuk umum itu, disusunlah perencanaan pembangunan untuk jangka menengah dan dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan untuk jangka pendek (tahunan). Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Artinya rencana jangka menengah harus sejalan dengan rencana jangka panjang dan rencana tahunan harus sejalan dengan rencana jangka menengah. Ateng Syafrudin mengemukakan langkah-langkah utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah

---

<sup>20</sup> Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 40.

3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan
4. Merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang
5. Merumuskan beberapa pilihan strategis rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah
6. Mengikuti pilihan-pilihan strategis dan memilih/ menetapkan strategi yang optimum
7. Merumuskan rencana dan anggaran tahunan
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan
9. Melaksanakan rencana/ program tahunan
10. Melakukan pemantauan (*monitoring*)
11. Melakukan evaluasi
12. Memperoleh dan menyediakan umpan balik<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perolehan data dan informasi untuk dianalisis lebih lanjut guna menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam bentuk rencana dan anggaran tahunan. Untuk selanjutnya rencana dan anggaran tahunan ini akan disyahkan agar bisa dilaksanakan, untuk kemudian diadakan pemantauan dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik.

#### **4. Organisasi yang Mengelola Perencanaan**

##### **a. Kelembagaan Perencanaan**

---

<sup>21</sup> Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 40.

repository.ub.ac

Lembaga pemerintah yang berwenang merencanakan pembangunan terdapat di tingkat nasional (pusat) dan di tingkat daerah. Di tingkat pusat terdapat Bappenas sedangkan di tingkat daerah terdapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Namun saat ini Bappeda telah berganti nama menjadi Bappeko untuk wilayah Kota, Bappekab untuk wilayah kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Keputusan Presiden ditunjuk Menteri Negara sebagai Ketua Bappenas. Menteri Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan perencanaan pembangunan nasional;
2. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut pada huruf (a) di atas;
3. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah guna tercapainya kerja-sama yang serasi, selaras, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan progam pemerintah secara menyeluruh;
4. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Biro Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional sejauh menyangkut bidang perencanaan pembangunan nasional<sup>22</sup>

Pimpinan Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya yang menyangkut bidang tugas tanggung jawab Menteri Negara berkewajiban mengadakan konsultasi dengan Menteri Perencanaan

---

<sup>22</sup> Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 26-27

Pembangunan mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan di Indonesia ditegaskan sebagai Perencanaan Pembangunan karena negara adalah negara yang baru berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan yang dimulai tahun 1969/1970. Ketentuan hukum yang mengatur perencanaan tersebut dapat dibedakan antara yang berskala nasional dan yang berskala daerah. Untuk tingkat nasional dasar hukumnya berturut-turut:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan MPR tentang GBHN;
3. Berbagai Undang-undang pokok sektoral;
4. Keputusan-keputusan persiden tentang Pembentukan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1983 tentang penetapan tugas pokok Menteri Negara Ketua Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas);
6. Keputusan Presiden tentang Pembentukan Bappenas;
7. Peraturan-peraturan Menteri<sup>23</sup>

**5. Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 sampai 154 yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, dimana pada pasal 150 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

---

<sup>23</sup> Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 25.

4. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
5. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah<sup>24</sup>

- a. Pengertian, Tugas dan Fungsi

Bappeko adalah Badan Perencanaan Kota yang berada di wilayah kota untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan. Bappeko ini dulu bernama Bappeda. Berikut ini pengertian, Tugas dan Fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan yang kurang lebih sama dengan tugas dan fungsi Bappeko yang berbeda hanya dalam hal nama saja.

1. Pengertian Bappeda

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 185 Tahun 1980, yang dimaksud dengan Bappeda adalah:

- a. Bappeda yang selanjutnya adalah badan Staff yang langsung berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati, Walikota, Kepala Daerah.
- b. Bappeda dipimpin oleh seorang ketua

Pada hakekatnya Bappeda merupakan sebuah badan yang diupayakan untuk membantu Gubernur atau Bupati, Walikota, Kepala Daerah dalam

---

<sup>24</sup> Bryant, Coralie dan White Louis. 1999. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES. Hlm.306

menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan di daerah.

## 2. Tugas Bappeda

Jika dalam tingkat nasional koordinasi pembangunan dilakukan oleh Bappenas, pembangunan ditingkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda. Menurut Syarifudin kedudukan, fungsi dan tugas Bappeda disebutkan bahwa setiap propinsi dibentuk Bappeda yang merupakan badan staff yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur daerah yang bersangkutan<sup>25</sup> Bappeda dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 27 tahun 1980 dimana landasan operasional terdapat di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 tahun 1980, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda. Untuk Menjalankan fungsinya Bappeda mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II
- b. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional

---

<sup>25</sup> Syarifudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung. Hlm. 96.

- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II.
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah
- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat II<sup>26</sup>

Dari tugas-tugas diatas dapat diketahui bahwa Bappeda berperan sebagai perencana pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

### 3. Fungsi Bappeda

- a. Bappeda mempunyai beberapa fungsi diantaranya:
  - a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita daerah
  - b. Menyusun repelita daerah.

---

<sup>26</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## b. Dasar Hukum

Untuk tingkat daerah, beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional adalah:

1. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN);
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL);
6. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Mendagri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Pebruari 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Tingkat Kota Kediri No. 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Fungsi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Kediri
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
  - b. Pembinaan obyek dan daya tarik wisata serta pesona wisata budaya sebagai pemikat wisatawan.
  - c. Memberi perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta Kerumah tanggaan Kantor<sup>27</sup>

#### 5. Peranan Badan Perencanaan Kota (BAPPEKO) Kediri

Mengacu kepada dokumen Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005 – 2009, disebutkan bahwa tujuan Pemerintah Kota Kediri adalah : “meningkatnya kualitas penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan”.

Adapun sasaran Pemerintah Kota Kediri adalah:

1. Meningkatnya efektifitas penelitian;
2. Meningkatnya efektifitas perencanaan;
3. Terwujudnya tata ruang yang kondusif bagi pemerintah kota

BAPPEKO Kediri sebagai institusi perencana secara operasional melaksanakan amanat dalam RPJM tersebut diatas. Mengacu kepada Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri, terdapat beberapa Program Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh BAPPEKO Kediri, sebagai berikut:

1. Program pengelolaan lingkungan hidup;
2. Program penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. Program pengembangan koperasi, UMKM dan pemberdayaan;
4. Program penyehatan lingkungan dan peningkatan kesadaran untuk berlaku hidup sehat.

Berdasarkan program kota tersebut diatas dan setelah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

---

<sup>27</sup> Kantor Pariwisata Seni dan Budaya. 2007. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)*. Kediri: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh BAPPEKO Kediri adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan utama:
  - a. Penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
  - b. Penyusunan dokumen pengelolaan transportasi di Kota Kediri.
2. Program kerja sama pembangunan
3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Fasilitas UMKM untuk mendapat pinjaman dari debitur
4. Program penyehatan lingkungan dan peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan air bersih, penyehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat.
5. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Koordinasi pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
6. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan:
  - a. Musrenbang RKPD, RPJM dan RPJPD
  - b. Penyusunan RKPD, RPJM dan RPJPD
  - c. *Software* perencanaan pembangunan
7. Program monitoring dan evaluasi pembangunan dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan
  - b. Penyusunan dokumen Kediri dalam angka

8. Program penelitian dan pengendalian pembangunan dengan kegiatan:

- a. Penyusunan dokumen penelitian

## **B. Pengembangan Wisata**

### **1. Perlunya Daerah Wisata Dikembangkan**

Alasan utama pengembangan wisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain pengembangan wisata pada suatu daerah selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kita menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang dengan baik dengan sendirinya akan memberi dampak positif bagi daerah itu, salah satunya adalah dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan kepariwisataan yang tertuang dalam Intruksi Presiden diantaranya:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja yang mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional<sup>28</sup>

Kemudian menurut Selo Soemardjan mengemukakan bahwa:

---

<sup>28</sup> Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 Tentang Pengembangan Kepariwisataan.

“Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. Disamping itu rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata”<sup>29</sup>

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pengembangan wisata perlu dilakukan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta usaha kepariwisataan yang kecil, menengah, dan besar agar saling menunjang. Partisipasi masyarakat sekitar daerah wisata sangat diperlukan untuk mendorong keberhasilan pembangunan.

Salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan selain keuntungan ekonomi dalam pengembangan wisata tetap harus mewujudkan terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan, serta pariwisata dalam negeri harus senantiasa terus dikembangkan dan diarahkan untuk memupuk rasa cinta pada tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat, nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Dari berbagai penjelasan dan pengertian yang telah kita ketahui diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan wisata diartikan sebagai upaya yang dilakukan baik pemerintah sendiri, pihak pemilik modal, swasta, maupun masyarakat setempat guna mengembangkan potensi-potensi objek wisata yang ada di daerah yang dilakukan secara terpadu dan berdaya guna dengan tetap memperhatikan kepribadian bangsa.

---

<sup>29</sup> Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Konisius. Hlm. 133.

## 2. Prinsip-prinsip Pengembangan Wisata

Menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1983 tentang GBHN, tentang pengembangan pariwisata prinsip-prinsip pengembangan wisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta kelestarian lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan pengembangan pariwisata dalam negeri ditingkatkan dengan tujuan lebih mengenalkan alam dan kebudayaan bangsa dalam rangka memupuk cinta tanah air dan menanamkan, jiwa semangat dan nilai-nilai 1945, di samping untuk memperluas lapangan kerja;
- c. Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu diambil langkah dan pengaturan lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain berupa peningkatan kegiatan promosi dan pendidikan kepariwisataan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan<sup>30</sup>

## 3. Kendala-kendala Pengembangan Wisata

Beberapa kendala-kendala atau permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan wisata antara lain:

---

<sup>30</sup> Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Konisius. Hlm. 75.

- a. Belum terpadunya pola perencanaan pengembangan pariwisata antar daerah sehingga dapat menyulitkan dalam penataan dan penawaran produk pariwisata.
- b. Masih terbatasnya kesiapan daerah dalam menyiapkan perangkat hukum pariwisata.
- c. Masih rendahnya minat investasi masyarakat dalam negeri di bidang usaha pariwisata.
- d. Belum terealisasinya kualitas produk pariwisata yang memiliki standarisasi nilai universal.
- e. Masih rendahnya partisipasi usaha pariwisata Jawa Timur dalam berbagai event promosi pariwisata baik untuk skala nasional, regional maupun internasional.
- f. Masih adanya kesenjangan kondisi antara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan tuntutan pasar yang memiliki sertifikasi kompetensi menurut profesi keahlian masing-masing.
- g. Adanya tuntutan pasar global terhadap tersedianya penawaran produk pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai standar pelayanan universal, perlindungan konsumen dan ramah lingkungan serta kurangnya revitalisasi produk pariwisata.
- h. Belum optimalnya penguatan citra pariwisata Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata andalan.
- i. Pemahaman otonomi daerah pada tatanan aspek kewenangan telah menimbulkan beberapa permasalahan yang menyangkut belum terwujudnya standar regulasi perusahaan pariwisata.

#### 4. Strategi Pengembangan Wisata

repository.ub.ac

Strategi pengembangan menunjukkan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi pengembangan terdiri dari<sup>31</sup>:

a. Strategi Pengembangan Produk Pariwisata

Menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengembangan aksesibilitas atau angkutan wisata, usaha makan minum dan sebagainya.

b. Strategi Pengembangan Pasar dan Promosi

1. Strategi Pengembangan Pasar

Dalam strategi pengembangan pasar dirumuskan orientasi pasar yang akan diraih dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menarik pasar tersebut dengan mempertimbangkan jenis dan potensi obyek, daya tarik potensial yang ada serta jenis atau bentuk pariwisata yang dikembangkan.

2. Strategi Promosi

Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam mempromosikan daerah. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran dan target wisatawan yang akan diraih.

Strategi harus mendatangkan hasil sebesar mungkin dalam bentuk:

- Perhatian masyarakat pada produk itu
- Kesan yang menyenangkan dari masyarakat terhadap produk itu
- Hasrat untuk membeli jika keadaan memungkinkan

<sup>31</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2002. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten atau Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata. Hlm. 29.

- Upaya masyarakat untuk menanyakan lebih rinci tentang produk itu<sup>32</sup>

### 3. Strategi Pemanfaatan Ruang untuk Pariwisata

Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup kabupaten atau kota memberikan gambaran dan indikasi lokasi-lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan analisis terhadap potensi dan daya tarik wisata yang ada di wilayah tersebut, meliputi penetapan pusat-pusat pengembangan, penetapan kawasan prioritas pengembangan, penetapan jalur atau koridor wisata

### 4. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan landasan kewenangan sebagai daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 antara lain adalah penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) potensial. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia pariwisata potensial menurut konsepsi nasional adalah SDM pariwisata sebagai asset daerah yang memiliki standar kemampuan (*knowledge dan skill*) menurut kompetensi keahlian yang diakui dan diterima oleh masyarakat pariwisata (*user*) serta dilandasi oleh dedikasi kebangsaan yang tinggi sehingga memiliki nilai kompetitif dan mampu berkisah sekala nasional dan internasional.

Strategi pengembangan SDM merupakan strategi yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan SDM di bidang kepariwisataan sangat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal, disamping itu akan meningkatkan apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar internasional. Strategi pengembangan SDM antara lain:

---

<sup>32</sup> Wahab, S. 1988. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Pramita. Hlm. 161-162

- a. Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan dan pemandu wisata.
- b. Peningkatan kemampuan berbahasa asing dikalangan *stake holder* yang bergerak di bidang pariwisata; seperti tenaga kerja diusaha pariwisata, dan pemerintah daerah.
- c. Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah
- d. Peningkatan kemampuan teknis di bidang manajemen kepariwisataan
- e. Peningkatan kemampuan dibidang perencanaan dan pemasaran pariwisata

#### 5. Strategi Investasi

Berisikan langkah-langkah strategik yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di bidang kepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal yang berasal dari luar daerah itu sendiri, meliputi:

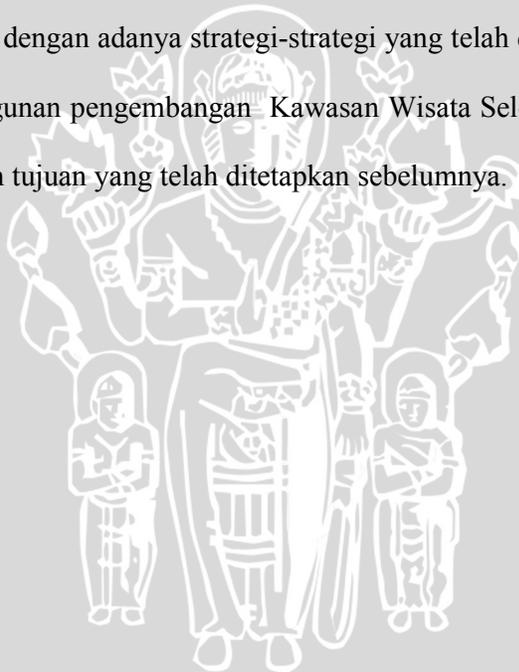
- a. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanam modal pada usaha pariwisata.
- b. Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan masyarakat yang akan berusaha di bidang kepariwisataan.
- c. Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.
- d. Menyiapkan infrastruktur antara lain: jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya.
- e. Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi investasi tetapi memiliki potensi pariwisata.

#### 6. Strategi Pengelolaan Lingkungan

Merupakan strategi umum yang mendasari pengembangan kepariwisataan yang dilakukan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah produktif di dalam upaya pelestarian lingkungan, alam dan budaya meliputi:

- a. Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan, alam dan energi
- b. Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata
- c. Peningkatan dan pemantapan konservasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap perubahan.

Di harapkan dengan adanya strategi-strategi yang telah disebutkan diatas perencanaan pembangunan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam usaha untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki”<sup>33</sup>

Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>34</sup>. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsep khusus yang alamiah.

Jadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan, dengan melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasikannya dan kemudian barulah diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

<sup>33</sup> Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 63.

<sup>34</sup> Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkap apa adanya yang terjadi dilapangan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil tanpa maksud menguji hipotesa dan peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain dapat menjadi alat pengumpul data utama.

## **B. Fokus Penelitian**

Sebelum dijelaskan mengenai fokus penelitian, maka terlebih dahulu dijelaskan maksud ditetapkan fokus. Maksud ditetapkan fokus yaitu, “pertama penetapan fokus dapat membatasi studi, kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan”<sup>35</sup>

Fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan fokus ini akan membantu peneliti kearah mana penelitiannya akan dibawa. Dengan demikian yang menjadi penekanan dari fokus penelitian ini adalah masalah apa saja yang semestinya dikumpulkan sehingga dapat mendukung dalam pemecahan masalah nantinya.

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan wisata selomangleng oleh BAPPEKO
  - ❖ Hambatan
  - ❖ Solusi
2. Peningkatan terhadap PAD kota Kediri

---

<sup>35</sup> Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 62-63.

- ❖ Pendapatan Asli Daerah kota Kediri sebelum pengembangan kawasan wisata selomangleng kota Kediri.
- ❖ Pendapatan Asli Daerah kota Kediri setelah pengembangan kawasan wisata selomangleng kota Kediri.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai obyek penelitian. Sedangkan situs penelitian berkaitan dengan letak dimana penelitian dilakukan dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan lokasi dan situs penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di wilayah Pemerintah Kota Kediri, Jawa timur.
2. Situs penelitian di Kantor BAPPEKO Jl. Basuki Rachmad No. 15 Kediri.
3. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Jl. Mastrip – Selomangleng Kediri.
4. Kawasan Wisata Selomangleng

Alasan penelitian ini mengambil lokasi dan situs penelitian tersebut adalah:

#### 1. Alasan Akademis

Badan Perencanaan Kota (BAPPEKO) Kediri merupakan salah satu instansi yang memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### 2. Alasan Non Akademis

- a. Dengan mengambil lokasi penelitian di daerah asal diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi peneliti sendiri.
- b. BAPPEKO Kediri bersedia menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu sesuai dengan keperluan peneliti.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan responden, untuk keperluan tersebut.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kondisi pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.

3. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.

### D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya,<sup>36</sup>.

Sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut bisa menjadi data sekunder

---

<sup>36</sup> Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 157

kalau dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari Kepala BAPPEKO Kota Kediri atau yang mewakilinya dan kepala seksi perencanaan Kantor Pariwisata, Seni dan Kota Kediri atau yang mewakilinya.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data dari majalah, dan koran. Dalam penelitian ini data sekunder di dapatkan dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor BAPPEKO Kediri dan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri.

### **E. Instrumen Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka instrument penelitian yang utama adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang berlangsung pada obyek penelitian bertanya, melacak dan mengabstraksikannya.
2. Pedoman wawancara, yaitu dalam pedoman ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan adanya pedoman wawancara ini, maka akan dapat membantu peneliti dalam menggali data yang diperlukan.
3. Catatan (*field note*), yaitu catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dilapangan.

### **F. Analisis Data**

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga diperlukan proses

penyederhanaan data agar data-data yang telah diperoleh akan lebih mudah untuk dibicarakan dan diinterpretasikan. Dengan demikian akan diperoleh suatu data yang lebih akurat.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Kegiatan yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan, suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data peneliti dapat menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang lebih mudah dipahami.

#### 3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan mencari makna yaitu, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsisi verifikasi berarti meninjau ulang catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sampai mencapai validitas<sup>37</sup>

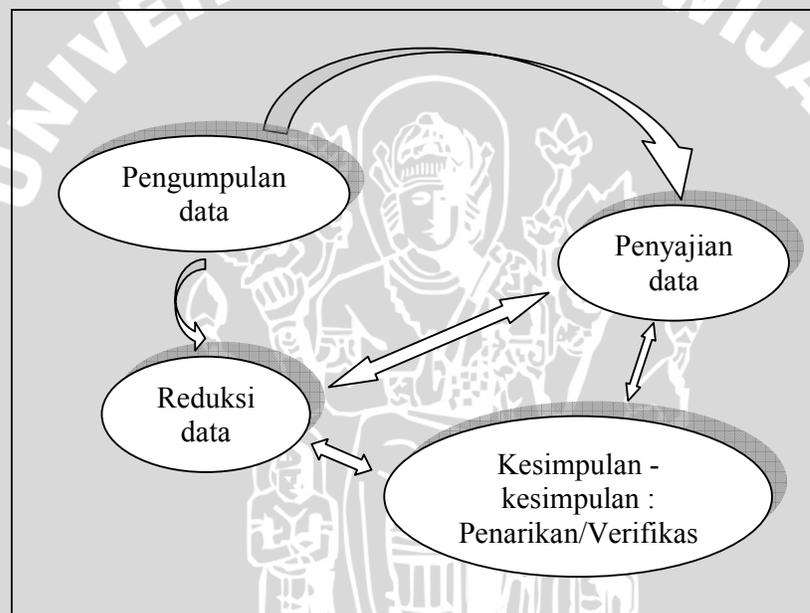
---

<sup>37</sup> Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Di Terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 16.

Analisis yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data dengan memperhatikan poin-poin diatas adalah analisis diskriptif, yaitu usaha untuk menganalisa data dengan menggambarkan fakta yang ada. Ketiga jenis kegiatan analisis data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif. Terlihat seperti gambar berikut:

**Gambar 1**

Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Miles & Hubberman (1992:20)

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Terdiri dari Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Bab yang mengemukakan landasan-landasan teori yang akan mendasari penulisan skripsi yang terdiri dari Keberadaan dan Fungsi Unit Perencanaan dalam Pembangunan, Pengembangan Wisata, Kerangka Pemikiran.

**BAB III** : Bab yang mengemukakan Metodologi Penelitian yang akan digunakan dalam skripsi yang terdiri dari Jenis Penelitian, Fokus, Lokasi dan Situs, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian serta Analisis Data.

**BAB IV** : Bab yang mengemukakan mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian dan mengemukakan Hasil dan Pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng dan Analisis oleh BAPPEKO dalam rangka peningkata PAD kota Kediri.

**BAB V** : Bab yang merupakan akhir atau penutup dari penulisan skripsi yang berupa kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kota Kediri

###### a. Kediri Jaman Kerajaan

###### a.a. Kebesaran Masa Lalu

Sudah menjadi pengetahuan umum, Kediri merupakan daerah yang memiliki sejarah masa lalu yang gemilang. Bahkan Kediri di masa lalu adalah daerah penting dalam konstelasi nusantara karena menjadi salah satu pusat di antara kerajaan-kerajaan nusantara masa itu. Kediri juga menjadi salah satu daerah yang menjadi saksi bagi kebangkitan dan kehancuran kerajaan-kerajaan di nusantara yang memang silih berganti timbul tenggelam mewarnai lembaran sejarah kehidupan bangsa besar nusantara ini. Khusus bagi Jawa Timur, Kediri di masa-masa silam merupakan daerah yang bisa dikatakan cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar sekaligus menjadi payung bagi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Pusat kerajaan baru di Jawa Timur muncul diantara dua masa berlangsungnya pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah. Hal ini kita ketahui dari sebuah prasasti bertahun 729 saka (840 M) yaitu "Prasasti Harinjing" di Desa Sukabumi, Kec. Kepung Kab. Kediri. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan huruf kawi (Jawa Kuno). Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di belahan barat dan Mataram disebelah timur pada tahun 928 selagi Empu Sendok berkuasa di tanah air kita membuat perkembangan kerajaan-kerajaan kecil

diseluruh Jawa, termasuk Jawa Timur berkembang pesat. Mpu Sendok sebagai seorang bangsawan yang berasal dari Kerajaan Mataram mendirikan kerajaan baru di Jawa Timur, dengan gelar Rakai Hino Mpu Sendok Sri Icana Wikramadharma Tungadewa (929-947). Ibukota Negara Icana tidak jelas, tetapi kira2 pusat pemerintahan tersebut terletak di Loceret Nganjtini ditandai dengan ditemukannya Candi Lor yang menunjukkan tahun 929-1222M.

Setelah Mpu Sendok meninggal tahun 947 M, kepemimpinan pemerintahan Mataram diganti oleh Sri Isyana Tunggawijaya, yang kemudian mempersunting Putri Lokapala. Pernikahan tersebut memberikan putra yang kemudian menggantikan kedudukan Tunggawijaya yaitu Sri Makutawangsa Whardana. Selanjutnya pada tahun 990-1007 Kerajaan Mataram dikendalikan oleh Sri Dharmawangsa mati terbunuh sedangkan Airlangga dapat meloloskan diri dari peristiwa itu dengan diiringi Narottama, kemudian selama 4 tahun hidup di hutan dekat Wonogiri.

#### **a.b. Pemerintahan Airlangga**

Pada tahun 1019 atas pemerintahan beberapa Adipati dan kaum Brahmana yang masih setia, Airlangga diangkat untuk menduduki tahta kembali. Ia bertahta dan bergelar Sri Maharaja Rakelahu Crilo Keswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrawai-Tungadewa. Pada masa pemerintahannya, Airlangga berusaha menyatukan daerah-daerah Kerajaan Dharmawangsa yang telah terpecah belah akibat pengaruh Sriwijaya dengan kebijakan seperti :

- a. Memindahkan ibukota kerajaan dari Wuwutan Mas ke Kahuripan kembali.
- b. Mengadakan perbaikan sistem pengadilan dengan menghapus hukuman siksa diganti dengan hukuman denda.
- c. Memajukan pertanian dengan mendirikan pematang-pematang besar di Desa Wringin Sapt pada Sungai Brantas, sehingga desa dan sawah-sawah

terhindar dari banjir, Bandar Ujung Gakuh dekat Surabaya menjadi makmur.

- d. Memperhatikan dan memajukan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri ke Champa, India Utara dan India Selatan.
  - e. Memerintahkan menyalin buku Mahabarata kedalam bahasa Jawa Kuno sehingga rakyat dapat membaca dan terpengaruh oleh peradaban Hindu.
- Mpu Kanwa menyalin buku Arjuna Wiwaha sebagai lambang perkawinan Airlangga, dan Gatot Kaca Sraya.

Mendirikan pertapaan yang indah di puncangan, serta memperbaiki tempat-tempat suci

Sesuai dengan kehidupan orang Hindu Airlangga ingin memenuhi kewajiban yaitu menjadi pertapa, dan sebelum mengundurkan diri pada tahun 1041 ia membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk kedua putranya adapun pembagian kerajaan sebagai berikut :

- a. Bagian Timur : Kerajaan Jenggala dengan ibukota Kahuripan meliputi daerah Surabaya, Malang dan Besuki.
- b. Bagian Barat : Kerajaan Panjalu atau Kadiri meliputi daerah Kediri, Madiun dengan ibukota Dahapura.

Airlangga menjadi pertapa terkenal dengan nama Jatiwindra atau Maharesi Gentayu hingga akhir hidupnya tahun 1049 dan abu jenazahnya dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan.

#### **a.c. Kerajaan Kadiri**

Ketidakcakapan raja-raja yang memerintah Kerajaan Jenggala, membuat Jenggala tidak terdengar lagi untuk waktu yang tidak beberapa lama. Kemudian kebesaran nama kerajaan di wilayah timur ini digantikan dengan munculnya kerajaan Panjalu yang lebih dikenal dengan nama kerajaan Dhaha. Letak ibukota

repository.ub.ac

kerajaan ini diperkirakan terletak di kota yang terkenal dengan nama Kediri sekarang ini. Sekitar paruh waktu abad ke-11, mulailah sejarah kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Jayawarsa sebagai raja pertama di kerajaan tersebut. Periode pemerintahan kerajaan Sri Jayawarsa diperkirakan pada tahun 1104 sampai dengan 1115 M. Setelah Sri Jayawarsa mangkat dari kepemimpinan-nya, pemerintah Kadiri dipercayakan kepada putranya yang bernama Kamiswara. Masa pemerintahan Kamiswara diperkirakan terjadi antara tahun 1115 sampai dengan 1130 M. Untuk mengakhiri pertengkaran antara Kadiri dengan Jenggala, maka Kamiswara mengawini putri Jenggala yang bernama Sri Kirana. Hal ini diyakini sebagai perkawinan politik yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Pada jaman kepemimpinan Kamiswara tersebut, banyak bermunculan pujangga-pujangga terkenal, salah satu pujangga yang populer pada saat itu Mpu Dharmaja yang mengarang Kitab Semara Dahana, dan Mpu Tanakung yang mengarang Kitab Lubdaka dan Wertansantya.

Sepeninggal Kamiswara, kerajaan Kadiri dipimpin oleh Sri Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135-1157 M. Sri Jayabaya terkenal sebagai pujangga dan sering dihubungkan dengan buku-buku karangan Beliau yang dinamakan persis seperti nama Beliau yaitu Jayabaya. Pada jaman Jayabaya tersebut hidup dua pujangga terkenal yaitu Mpu Panuluh yang kemudian menyelesaikan Buku Mahabarata. Setelah Jayabaya, kerajaan Dhaha di perintah oleh, antara lain :

1. Sawosworo pada tahun 1159-1161
2. Aryoso pada tahun 1171-1174
3. Gandra pada tahun 1181
4. Kamesworo II pada tahun 1182-1185

#### **b. Kediri Jaman Penjajahan**

### **b.a. Kediri Jaman Penjajahan Jepang**

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 10 maret 1942, maka Kota Kediri pun mengalami perubahan pemerintahan. Karena wilayah kerja *Gemeente* Kediri yang begitu kecil dan tugasnya sangat terbatas, maka oleh pemerintah jepang daerahnya diperluas menjadi kota. Daerah Kediri Shi atau Kediri Kota dikepalai oleh Shico. Kediri Shi terdiri dari 3 Son (kecamatan) dan dikepalai oleh Shonco Son (Camat) yang terdiri dari beberapa Ku (desa), dimana tiap Ku dikepalai oleh seorang Kucho(kepala desa) Pemerintahan kediri Shi dipimpin oleh seorang Shico (walikotamadya), dimana kekuasaannya tidak saja menjalankan pemerintah otonomi tetapi juga menjalankan *Algemeen Bestuur* tidak didampingi oleh DPRD, karena wewenang penuh berada ditangan Kediri Sicho.

### **b.b. Kediri Jaman Penjajahan Hindia Belanda**

Belanda yang berdagang di Lisabon untuk mengambil barang dagangan yang didatangkan dari Asia Selatan oleh Bangsa Portugis pada tahun 1580 menghadapi kondisi yang serba sulit karena persaingan. Oleh karena kesulitan tersebut, maka Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya mendarat di pantai Banten. Pada saat ini, Belanda mendapat rintangan dari orang-orang Portugis sehingga mereka berusaha untuk mempersatukan pedagang-pedagang Belanda dalam satu badan perdagangan yaitu VOC (*Verengde Ost Indischet Compagniw*) pada tahun 1602. Sekitar tahun 1799 VOC mengalami kerugian besar akibat korupsi pejabat-pejabatnya, sehingga dibubarkan. Segala hak dan kewajibannya diambil oleh Pemerintah *Republic Mataaf (Bataafsche Republic)* pada tahun 1799 – 1807.

Pada tahun 1807 *Republic Bataafche* dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi kerajaan Belanda (*Konninkrijk Holand*).

repository.ub.ac

Dengan adanya perubahan ketatanegaraan ini menyebabkan Indonesia bagian dari kerajaan Belanda.

#### **b.c. Kota Kediri di Awal Tahun 1906**

Berdasarkan *Staatblad* ( Undang-Undang Kenegaraan Belanda ) No. 148 tertanggal 1 Maret 1906, mulai berlaku tanggal 1 April 1906, di Kediri dibentuk *Gemeente* Kediri sebagai tempat kedudukan *Resident* Kediri. Sifat Pemerintahan di Kediri tersebut oleh Belanda diberikan kewenangan otonomi terbatas dan sudah mempunyai *Gemeente Raad* sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 8 orang golongan Eropa dan yang disamakan, 4 orang Pribumi (*inlander*) dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Berdasarkan *Staatsblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906, bangsa Belanda menetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan *Staatsblad* No. 498 status Kediri menjadi *Zelfstandig Gemeenteschap* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928, yaitu daerah yang memiliki Otonom Penuh.

Meskipun telah dibentuk “ *Dependen Gemeente* Kediri ” Pemerintah dalam negeri atau de *Algemene bestuursroering* tidak dipegang oleh *Gemeente* Kediri tetapi dipegang oleh *Het Inlandeche Bestuur* yang dipimpin oleh *Regent Ven* Kediri 9 Bupati, wewenang *Gemeente Bestuur* hanya meliputi pengurus got-got dalam kota, pungutan karcis pasar, pemeliharaan jalan kota dan pungutan pengendara sepeda. Pemerintahan umum dipegang oleh Assisten Wedono dan Bupati, jadi tidak ada hubungan hirarkis di dalam pemerintahan umum dengan *Bestuur*, yang terjadi hanya merupakan hubungan kerja dan kepomongprajaan yang saat itu dipegang oleh Bupati Kediri.

#### **b.d. Kediri Jaman Kemerdekaan**

Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 agustus 1945 dan 9 agustus 1945, membuat Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu pada

tanggal 14 agustus 1945, sehingga terjadi Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Tidak lama setelah proklamasi tersebut di Kediri muncul Syodancho Mayor Bismo (Mayor Bismo) bersama-sama tokoh Gerakan Pemuda yang dengan penuh semangat, penuh kesadaran disertai keberanian bertekad mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang.

Mayor Bismo mengawali masuk dan membimbing Fuku Cho Kan Alm. Abdul Rochim dan ditengah-tengah gelora massa mengumumkan kesediaannya berdiri di belakang Pemerintahan RI dan mengangkat diri sebagai Residen RI Daerah Kediri yang pertama. Massa rakyat dengan pimpinan Mayor Bismo menyerang Markas Ken Pe Tai (Jl. Brawijaya 27), yang diakhiri melalui perundingan dengan hasil Jepang menurunkan benderanya dan diganti dengan bendera Merah Putih bangsa Indonesia.

Demikian sekilas perebutan kekuasaan dari bangsa Jepang di Kediri. Habislah sejarah pemerintahan Jepang di Kediri, maka pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula Walikota didampingi oleh Komite Nasional Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun urutan-urutan perundang-undangan sampai Kediri menjadi Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :

1. UU RI. No. 22 Tahun 1948 tentang Prinsip Daerah Otonomi
2. UU RI. No. 44 Tahun 1950 STBL, No.498/28 dicatat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kota Besar
3. UU RI No. 1 Tahun 1967 tentang Bentuk Pemerintahan Daerah Kota Praja dan Daerah Swatantra Tingkat II
4. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1963 tanggal 25 September 1963 tentang Penghapusan Kawedanan dan Karesidenan

5. UU RI No. 18 Tahun 1995 tentang Daerah Otonom dan Sebutan Menjadi Kotamadya, dengan SK.42/Um tanggal 26 mei 1996 mengubah Kota Praja menjadi Kotamadya.
6. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah
7. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalamnya terdapat perubahan penyebutan Kotamadya menjadi Kota, maka penyebutan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri berubah menjadi Pemerintah Kota Kediri. Hingga sekarang Kota Kediri telah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian kepemimpinan di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dari pemimpin yang pertama hingga periode kepemimpinan Drs. H. Maschut (1999-Sekarang), Kota Kediri mengalami berbagai banyak hal kemajuan dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang non fisik. Keindahan kota Kediri semakin terlihat setelah kota Kediri mencanangkan slogan Kediri BERSEMI. Berbagai prestasi di raih dan diperoleh, tidak terkecuali dalam bidang olah raga yang mulai bangkit dengan melajunya PERSIK ke divisi I Liga Indonesia. Sehingga tidak terlalu muluk apabila Kota Kediri memang mewarisi kebesaran Kerajaan Kediri.

Tabel 1  
Nama Walikota Kediri Sejak 1945 Sampai Sekarang

No.	Nama Walikota	Periode
1.	R. Soeprapto	1945-1950

2.	R. Dwidjo Soemarto	1950-1960
3.	R. Soedjono	1960-1966
4.	Hartojo	1966-1968
5.	Anwar Zainudin	1968-1973
6.	Drs. Soedarmanto	1973-1978
7.	Drs. Setijono	1978-1989
8.	Drs. Wijoto	1989-1999
9.	Drs. H. A. Maschut	1999-Sekarang

Sumber: [www.kotakediri.go.id](http://www.kotakediri.go.id)

## 2. Potensi Pariwisata Kota Kediri

Wilayah Kota Kediri dan sekitarnya diyakini cukup potensial akan obyek-obyek pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber daerah. Hal ini dikarenakan adanya obyek wisata alam yang cukup potensial seperti Goa Selomangleng, Pegunungan Wilis, aliran Sungai Brantas, maupun obyek wisata buatan seperti Museum Airlangga, dan peninggalan situs Kerajaan Kediri. Disamping itu masih terdapat tempat-tempat rekreasi keluarga, seperti Taman Hiburan Rakyat Pagora, Pemandian Kuwak dan Dermaga Brantas.

Pemerintah Kota Kediri berusaha terus untuk membangun dan mengembangkan kepariwisataan guna memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, pendapatan asli daerah maupun pendapatan nasional. Sedangkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan tersebut, pemerintah Kota Kediri menanganinya melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran hidup tertib dan bersih, menambah atau memperbaiki fasilitas yang sudah ada, memperbaiki mutu pelayanan terhadap tamu lokal maupun dari luar daerah, mengadakan pemugaran dan pengembangan obyek-obyek wisata dan mempromosikannya melalui media yang telah disiapkan seperti situs [www.kotakediri.go.id](http://www.kotakediri.go.id), dan media lainnya dari dalam maupun dari luar.

Usaha lainnya adalah mendorong peran serta swasta untuk ikut dalam menunjang pembangunan sektor pariwisata, dengan adanya penyediaan jasa

penginapan (perhotelan), penyediaan fasilitas penunjang lainnya yang lebih baik untuk memberikan rasa nyaman serta betah tinggal di Kota Kediri.

Pengembangan obyek wisata di Kota Kediri sendiri terbagi dalam tiga macam sektor wisata yaitu :

1. Wisata Sejarah
2. Wisata Alam
3. Olahraga

a. Usaha-usaha Pengembangan Sektor Pariwisata

Dalam usahanya untuk mengarahkan Kota Kediri sebagai kota Wisata, pemerintah Kota Kediri melakukan dua hal. Pertama pengendalian dan pengembangan potensi wisata yang sudah ada, dan kedua menciptakan tempat-tempat wisata buatan yang baru seperti pembuatan taman hiburan, pembuatan dermaga, pemberian kesempatan swasta untuk membuka sarana hotel dan hiburan malam.

Pengembangan utama untuk kawasan wisata Kota Kediri adalah pengembangan wisata alam dan buatan pada Kawasan Wisata Selomangleng. Dalam kawasan tersebut terdapat tempat-tempat bersejarah yang memiliki panorama yang indah bila di kembangkan lebih lanjut. Pengembangan lainnya adalah tempat-tempat wisata buatan yang ada di Kecamatan Kota yaitu pada Taman Tirtoyoso dan Pagora.

b. Kawasan Wisata Selomangleng

Di kembangkan sebagai kawasan wisata alam dan perlindungan terhadap peninggalan bersejarah. Kegiatan-kegiatan yang di perbolehkan pada kawasan tersebut selain kegiatan rekreasi adalah :

- Olah raga
- Pendidikan dan Penelitian Sejarah

- Perkemahan
- Vila
- Kios Makan dan Suvenir
- Museum

c. Taman Wisata Tirtoyoso dan Pagora

Pengembangan pada taman wisata Tirtoyoso dan Pagora diarahkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan wisata dan sarana prasarana yang ada di dalamnya, di samping itu juga peningkatan jaminan keamanan serta kebersihan lingkungan, sehingga kawasan wisata tersebut memiliki jangkauan pelayanan lebih baik lagi dan membuat pengunjung merasa betah serta tidak di rugikan. Taman wisata Tirtoyoso dan Pagora yang saat ini sudah berjalan hendaknya di kembangkan menjadi taman hiburan rakyat yang lebih lengkap, sehingga menarik perhatian masyarakat yang lebih luas. Kelengkapan tersebut bisa dengan menambah sarana hiburan bagi anak-anak dan remaja, atau bisa juga menambah tempat-tempat pameran dan pertunjukan kesenian daerah.

d. Kawasan Wisata Industri

Pengembangan kawasan wisata industri di Kota Kediri di tentukan pada kegiatan-kegiatan industri yang ada dan memungkinkan di jadikan sebagai lokasi kegiatan wisata, seperti kawasan industri rokok Gudang Garam. Dimana pada kawasan idustri ini dilengkapi dengan jalur hijau dan taman-taman serta lapangan golf yang selain berfungsi sebagai kawasan konservasi/ hutan kota juga sebagai kegiatan rekreasi untuk umum. Selain itu wisata industri juga akan dikembangkan pada kegiatan *home* industri dan kompleks perdagangan tahu, makanan kecil berbahan baku tahu, kerajinan kulit dan bambu, dll.

e. Kawasan Wisata Pusat Perbelanjaan

repository.ub.ac

Untuk meningkatkan perekonomian sekaligus memberikan kenyamanan dalam kegiatan berbelanja sehingga pengunjung merasa lebih betah dan nyaman berada dalam kawasan perbelanjaan. Saat ini di Kota Kediri telah berdiri beberapa pusat perbelanjaan seperti Pasar Raya Sri Ratu, Plasa Golden, Borobudur Swalayan, dan yang sedang taraf negoisasi pembangunan adalah akan didirikannya kawasan perdagangan sekaligus kawasan rekreasi Alun-Alun Mal.

### 3. Keadaan Geografis dan Administratif

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya. Secara geografis, Kota Kediri terletak diantara 111,05 derajat – 112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 – 7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Kediri di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Utara; Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Grogol
- Sebelah Selatan; Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih
- Sebelah Timur; Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
- Sebelah Barat; Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen

Wilayah Kota Kediri secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Kelurahan

2. Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan
3. Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan

#### 4. Keadaan Topografi

Dari aspek topografi Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh Sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah daratan rendah terletak dibagian timur sungai, meliputi kota dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472m) dan Gunung Maskumambang (300m).

#### 5. Keadaan Demografi

Sesuai dengan data statistik Kota Kediri penduduk di wilayah Kota Kediri pada tahun 2005 sebanyak 240,163 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 117,916 jiwa dan perempuan sebanyak 122,247 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 3,788 jiwa /Km<sup>2</sup>. Sedangkan mata pencaharian penduduk menurut sektor ekonomi atau lapangan usahanya bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 2

Mata Pecaharian Penduduk Menurut Lapangan Usahanya

No.	Lapangan Usaha	Jumlah/ Jiwa	%
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	4.620	4,15
2.	Pertambangan	309	0,28
3.	Industri pengolahan	30.488	27,39
4.	Listrik, gas dan air minum	308	0,28
5.	Bangunan kontruksi	4.540	4,02
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	26.960	24,22
7.	Pengangkutan dan komunikasi	7.944	7,14
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perumahan	1.408	1,26
9.	Jasa lain-lain	34.727	31,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2005

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dari sembilan macam sektor lapangan usaha ternyata tenaga kerja di sektor industri pengolahan cukup dominan yaitu mencapai 30.488 jiwa (27,39%) disamping sektor perdagangan hotel dan restoran sebanyak 26.960 jiwa (24,22%). Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan PT. Gudang Garam Tbk. beserta anak perusahaannya yang tercatat menguasai hampir 98% perekonomian Kediri. Dari uraian tentang demografi dan pembagian wilayah administrasi Kota Kediri dapat disimpulkan dalam sebuah tabel tentang pembagian wilayah Kota Kediri secara administratif serta jumlah penduduknya sebagai berikut:

Tabel 3  
Pembagian Wilayah Kota Kediri Secara Administratif

Kec	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	RW	RT	Jmlh Penduduk
Kota	Maninsrenggo	1.764	6	21	3.064
	Rejo Mulyo	1.670	4	21	3.599
	Ngronggo	2.585	9	94	11.250
	Kaliombo	0.958	5	28	6.271
	Kampung Dalem	0.332	4	18	3.363
	Setonopande	0.383	4	28	5.197
	Ringin Anom	0.050	2	8	1.349
	Pakelan	0.214	3	15	3.333
	Setonogedong	0.059	2	5	1.310
	Kemasan	0.228	2	8	2.176
	Jagalan	0.043	2	8	2.301
	Banjaran	1.209	12	74	8.633
	Ngadirejo	1.470	12	56	11.309
	Dandangan	1.100	12	45	6.626
	Balowerti	0.830	8	30	7.011
	Pocanan	0.214	2	9	2.023
Semampir	1.791	6	29	7.113	
	<b>Jumlah</b>	<b>14.900</b>	<b>95</b>	<b>497</b>	<b>85.928</b>
Pesantren	Blabak	3.354	10	30	4.965
	Bawang	3.449	8	31	4.832
	Betet	1.891	8	21	3.618
	Tosaren	1.361	14	39	5.044
	Banaran	0.94	8	22	3.675
	Ngletih	1.237	3	14	1.956
	Tampuhrejo	1.864	6	21	3.709
	Ketami	1.894	5	29	3.688
	Pesantren	1.356	5	28	4.195
	Bangsai	1.029	5	34	6.109
	Burengan	1.283	11	33	4.650
	Tinalan	0.926	10	33	4.945
	Pakunden	1.024	6	35	4.938
	Singonegaran	0.990	5	40	7.139
Jamsaren	1.471	7	34	5.442	
	<b>Jumlah</b>	<b>23.903</b>	<b>111</b>	<b>444</b>	<b>68.905</b>
Mojooroto	Pojok	3.212	5	25	7.281
	Campurejo	1.504	6	29	6.192
	Tamanan	1.079	3	14	3.371

Banjarmati	1.133	7	22	3.962
Bandar Kidul	1.736	4	24	7.428
Lirboyo	1.113	8	23	7.286
Bandar Lor	1.386	7	38	8.612
Mojoroto	2.429	11	41	10.711
Sukorame	3.675	10	34	7.090
Bujel	1.826	5	32	6.190
Ngampel	1.952	4	26	4.498
Gayam	1.319	8	31	3.322
Mrican	1.418	7	32	6.384
Dermo	0.819	2	17	3.003
<b>Jumlah</b>	<b>24.601</b>	<b>87</b>		<b>85.330</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2005

Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa Kecamatan Mojoroto memiliki daerah yang paling luas yaitu 24,601 Km<sup>2</sup>, namun untuk jumlah penduduk yang paling banyak terletak di Kecamatan Kota yaitu sebanyak 85.928 jiwa dengan luas wilayah 14.900 Km<sup>2</sup>, sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Kota mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 5.767 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Konsentrasi penduduk di Kecamatan Kota ini bisa mengakibatkan ledakan urbanisasi, munculnya perilaku masyarakat yang kurang sehat sehingga memicu banyak kejahatan dan pemerataan pendapatan yang tidak seimbang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri dinilai perlu untuk melakukan penyebaran pembangunan dan penciptaan lapangan kerja secara merata dalam konteks wilayah yang menyebar di seluruh Kota Kediri.

## 6. Keadaan Perekonomian

Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek. Mulai pendidikan, pariwisata, komplek ruko dan pertokoan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Di bidang pariwisata, kota ini menyediakan Pagora, Petilasan Aji Jayabaya, Gua Selomangleng. Hal itu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas penginapan, pasar swalayan, transportasi dan biro wisata. Di bidang pendidikan, kota ini memiliki puluhan sekolah tingkat dasar dan menengah,

beberapa perguruan tinggi lokal, madrasah, hingga pondok-pondok pesantren, seperti Lirboyo, LDII, dan Queen Al-Falah.

Di bawah kepemimpinan Walikota H.A. Maschud, Kota Kediri mengalami berbagai perubahan, misalnya pembangunan mal terbesar, hotel bintang 3 pertama dan Kawasan Wisata Selomangleng bertaraf nasional. Maschud juga merencanakan pembangunan jembatan baru, meresmikan pasar grosir pertama di Kota Kediri, merencanakan jalur lingkaran luar Kota Kediri, dan membangun ruko.

Perekonomian di kota ini juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas pondok pesantren besar di pusat kota seperti LDII di mana setiap awal bulan selalu mengadakan acara pengajian akbar yang mengundang ribuan anggotanya.

#### **7. Keadaan Sosial Budaya**

Bila ditinjau dari segi sosial, masyarakat Kota Kediri pada umumnya adalah suku Jawa yang sebagian besar pemeluk agama Islam. Kehidupan mereka diwarnai oleh keberasaan yang serba religius. Hal tersebut ditunjang dengan keberadaan tempat-tempat pendidikan Islam yang menyebar diseluruh wilayah Kota Kediri, dan terbesar adalah Pondok Pesantren Lirboyo yang terletak di Kecamatan Mojojoto. Secara umum ciri-ciri masyarakat Kota Kediri dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Religius, dimana peranan Ulama/Tokoh Agama cukup menonjol di kalangan masyarakat
2. Bersifat paternalistik, yaitu masyarakatnya sangat tergantung kepada para pemimpin yang dijadikan pola panutan dalam berbagai kehidupan. Pemimpin yang menjadi panutan disamping pada pemimpin informal yang umumnya adalah para ulama.

3. Memiliki rasa kebersamaan dan toleransi keagamaan yang cukup tinggi yang melahirkan semangat gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah sehingga menjadi faktor pendorong yang positif bagi keberhasilan pembangunan<sup>38</sup>.

## **B. Peranan BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Kota Kediri.**

### **1. Sekilas Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)**

#### **Kediri**

##### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEKO**

###### **1. Kedudukan**

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Lembaga Teknis Daerah
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

###### **2. Tugas Pokok**

Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Kota yang meliputi perencanaan, dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan walikota.

---

<sup>38</sup> [www.kotakediri.go.id](http://www.kotakediri.go.id) 09 Maret 2008

### 3. Fungsi Bappeko

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3,

Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan Program Perencanaan Kota;
- c. Pengkoordinasian perencanaan diantara Dinas/Badan, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Program Pembangunan di Kota;
- f. Penyiapan dan Pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan Kota untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
- g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan antar Lembaga lainnya;
- h. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota;
- i. Pemantauan pelaporan atas pelaksanaan Pembangunan Kota.

#### b. Struktur Organisasi

##### 1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas:

1. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini;
2. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, pelayanan, protokol, hubungan masyarakat, penyusunan program dan perencanaan serta laporan badan Perencanaan Pembangunan Kota;

- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

2. Pelaksana koordinasi penyusunan program kerja Badan dan hubungan masyarakat;
3. Pelaksana pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
4. Pelaksana pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Unsur Pelaksana yaitu:

## 4. Bidang Penelitian dan Pengendalian

- a. Bidang Penelitian dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang Penelitian, Pengendalian, Statistik, dan Pelaporan, Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan sistem Perencanaan;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengendalian mempunyai fungsi:

1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian, pengendalian, statistik dan pelaporan, kerjasama pembangunan dan pengembangan sistem perencanaan;

2. Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan penelitian, pengendalian, statistik dan pelaporan, kerjasama pembangunan syistem perencanaan;

3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang penelitian, pengendalian, statistik dan pelaporan, kerjasama pembangunan dan pengembangan sistem perencanaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

4. Melakukan koordinasi penyusunan progam tahunan di bidang Penelitian dan Pengendalian;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Kesehatan, KB dan

Kependudukan, Pendidikan, Seni Budaya, Agama, Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Informasi;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan bidang Industri, Perdagangan, koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Kesehatan, KB dan Kependudukan, Pendidikan, Seni Budaya, Agama, Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Informasi;

2. Pengkoordinasian dan Pengintegrasian rencana pembangunan Industri, Pedagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Kesehatan, KB dan kependudukan, Pendidikan, Seni Budaya, Agama, Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Informasi yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Penginventarisasian permasalahan di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan progam tahunan di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

6. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan Bidang

Pemukiman, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata, SDA, SDI, Pertambangan dan Energi;

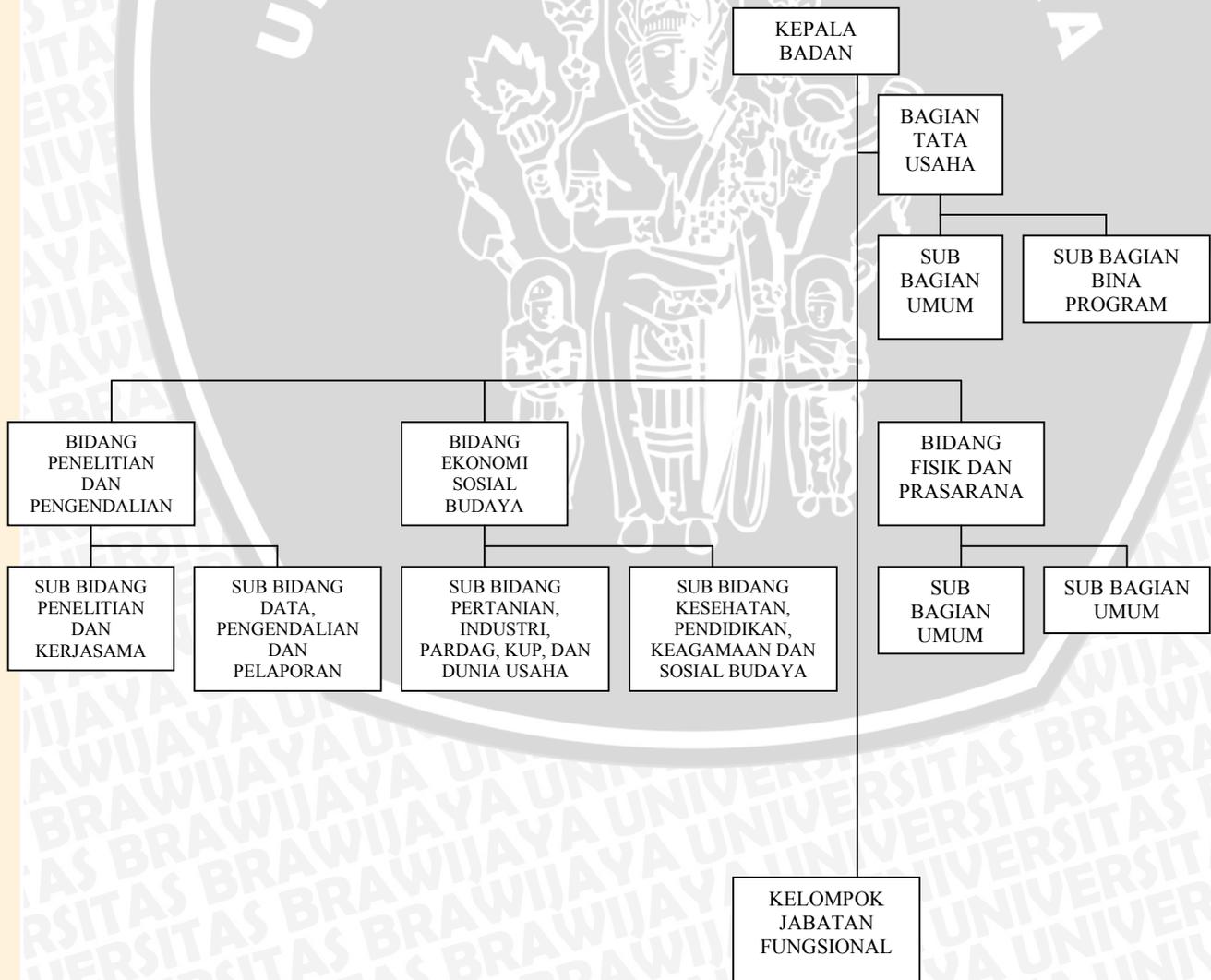
b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

1. Melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan bidang Pemukiman, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata, SDA, SDI, Pertambangan dan Energi;
2. Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan bidang Pemukiman, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata, SDA, SDI, Pertambangan dan Energi yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Kota sesuai dengan bidang spesialisasi keahliannya dan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat pengangkatan sebagai Tenaga Fungsional.

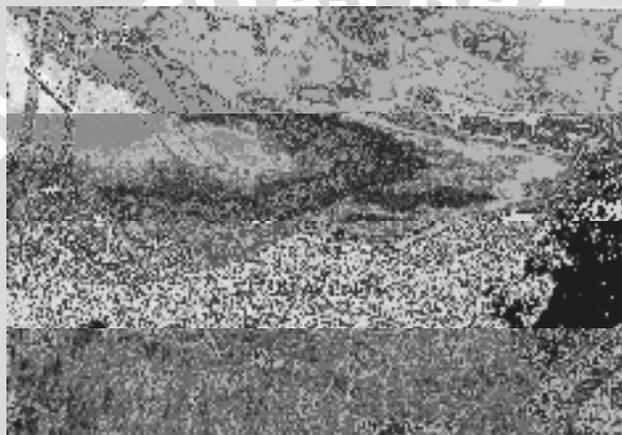
**STRUKTUR ORGANISASI BAPPEKO**



## 2. Sekilas Tentang Kawasan Wisata Selomangleng

Gambar 2

Kawasan Wisata Selomangleng di Lihat dari Kaki Gunung Klotok



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri,  
Tahun 2005

Kawasan Wisata Selomangleng terletak di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoagung. Dimana Kawasan Wisata Selomangleng terdiri dari beberapa obyek wisata antara lain: Museum Airlangga, Gua Selomangleng, Makam Kuno Mbah Bancolono, Pura Sekartaji, Taman Wisata Selomangleng, Gua Padedean, Gua Selobale dan Gunung Klotok.

Untuk menuju Kawasan Wisata Selomangleng dapat menggunakan angkutan bis (bis pariwisata), mikrolet (angkutan kota), mobil pribadi dan sepeda motor. Lokasi Kawasan Wisata Selomangleng dilalui oleh jalan sekunder yang menghubungkan pusat Kota Kediri kearah Kelurahan Bujel dan Kelurahan

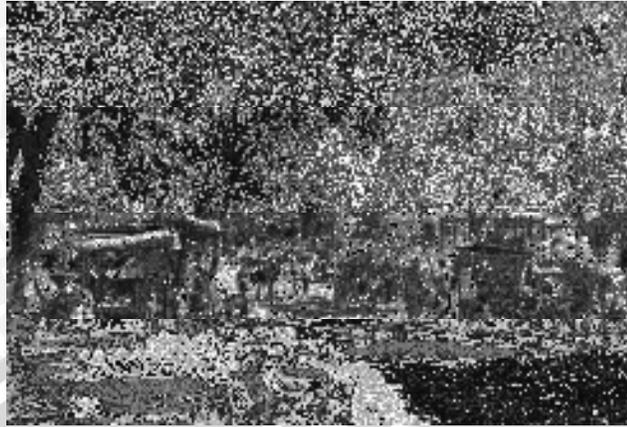
Sukorame Kecamatan Mojoroto. Dengan jenis perkerasan aspal dan lebar perkerasan  $\pm$  5 meter. Kondisi jalan yang cukup baik.

Pada Kawasan Wisata Selomangleng terdapat Kantor Dinas Pariwisata Kota Kediri. Dimana Kawasan Wisata Selomangleng telah dilengkapi dengan fasilitas seperti pos penjagaan (keamanan), lahan parkir, warung/ toko, musholla dan toilet. Lahan parkir yang ada cukup luas untuk bis (bis pariwisata), mobil pribadi, mobil penumpang dan mobil barang serta untuk sepeda motor. Sedangkan warung/ toko yang ada menjual makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Selain itu juga menjual beberapa perlengkapan seperti obat-obatan, rokok dan lain-lain.

Kondisi sarana prasarana yang terdapat pada Kawasan Wisata Selomangleng meliputi energi listrik, telepon, air bersih, drainase dan pengelolaan sampah. Untuk jaringan listrik sudah lama masuk dan memenuhi kebutuhan energi listrik di Kawasan Wisata Selomangleng. Pada ruas jalan yang ada sudah terdapat lampu-lampu penerangan untuk kebutuhan penerangan pada malam hari. Jaringan telepon juga sudah masuk pada Kawasan Wisata Selomangleng. Terbukti pada ruas jalan yang ada juga terdapat tiang jaringan telepon yang berakhir pada pertigaan jalan didepan Gua Selomangleng. Pada Kawasan Wisata Selomangleng, untuk kebutuhan air bersih dipenuhi dengan menggunakan air tanah yang disedot menggunakan pompa air. Sistem drainase pada lokasi juga sudah ada dan terencana dengan baik. Terdapat saluran drainase terbuka dan tertutup yang tertata sesuai kebutuhan sehingga pada saat hujan tidak terjadi masalah. Untuk pengelolaan sampah pada setiap sudut lokasi sehingga lokasi wisata terkesan bersih, indah dan nyaman.

Gambar 3

## Kawasan Wisata Selomangleng di Hari Minggu



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri,  
Tahun 2006

Pada hari-hari biasa, pengunjung yang datang tidak terlalu banyak. Tetapi pada hari libur/ Minggu jumlah wisatawan cukup banyak. Pada hari Sabtu malam Minggu suasana Kawasan Wisata Selomangleng cukup ramai dan terkesan hidup karena banyak para remaja yang nongkrong disekitar Kawasan Wisata Selomangleng tersebut.

### **3. Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng**

#### **a. Peranan BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng**

Otonomi Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa dampak bagi perencanaan pembangunan yang lebih mengedepankan masyarakat. Dimana dulu sebelum adanya otonomi peran masyarakat belum begitu nampak. Saat ini BAPPEKO Kediri mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap perencanaan dan dihadapkan dengan tantangan untuk dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat seiring dengan masalah-masalah perkotaan yang makin kompleks.

Sekarang ini kita berada pada era globalisasi dimana bidang informasi dan teknologi punya peran yang sangat penting. Sebagai insitusi yang berwenang terhadap aspek perencanaan pembangunan, maka BAPPEKO juga dihadapkan dengan tantangan berupa pendataan yang kurang efisien, dari segi kecepatan untuk memperoleh data dinas/ instansi terkait yang amat berguna dalam perencanaan pembangunan kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEKO Kediri menjadi koordinator dari berbagai dinas/ instansi terkait untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh staf BAPPEKO bagian fisik dan prasarana yang menjelaskan mengenai peranan BAPPEKO dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng, Beliau mengatakan bahwa:

“BAPPEKO mempunyai peranan yang sangat strategis, hal ini dikarenakan BAPPEKO merupakan instansi yang berperan melakukan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan yang akan dilaksanakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk rencana dan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri”<sup>39</sup>

- a. Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng)

Di dalam penyusunan progam pembangunan daerah, BAPPEKO memiliki mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah terjadwal selama satu tahun dengan melaksanakan kegiatan yang berbeda. Adapun proses perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

Gambar 4

---

<sup>39</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya



(renstra SKPD) setiap dinas/ instansi. Rancangan awal RKPD dan renstra SKPD ini kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD). Selanjutnya rencana awal RKPD di bawa ke musrenbang tingkat desa/ kelurahan dan musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian dilanjutkan pada forum SKPD yang merupakan hasil dari musrenbang tingkat kecamatan. Dalam forum SKPD ini melibatkan DPRD dan unsur masyarakat.

Rancangan awal RKPD dan rancangan renja SKPD ini juga di jadikan dasar penyusunan rancangan RKPD yang akan di bawa ke musrenbang tingkat kota/ daerah dan forum SKPD. Rancangan renja SKPD yang telah di bawa ke forum SKPD akan menghasilkan rencana kinerja SKPD (renja SKPD). Di dalam renja SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kota. Renja SKPD ini kemudian dipilah-pilah lagi menjadi Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) perkegiatan yang pada akhirnya menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rancangan RKPD yang dibawa ke musrenbang tingkat kota atau daerah akan menjadi Rancangan Akhir RKPD dan renja SKPD. Rancangan akhir RKPD ini di dasarkan juga pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan RKPD provinsi hasil dari musrenbang tingkat provinsi dan juga mendapat masukan dari renja SKPD. Rancangan akhir RKPD ini akan dikirim ke dewan yang kemudian menghasilkan Penetapan RKPD atau semacam Perda dan menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran –Prioritas Umum Anggaran Sementara (KUA-PUAS). Penetapan RKPD dan KUA-PUAS menjadi RAPBD akan dibahas oleh dewan.

Kemudian yang terakhir hasil dari musrenbang tingkat desa/ kelurahan sampai musrenbang tingkat kota/daerah akan dibawa ke musrenbang tingkat provinsi dan dilanjutkan pada musrenbang tingkat nasional.

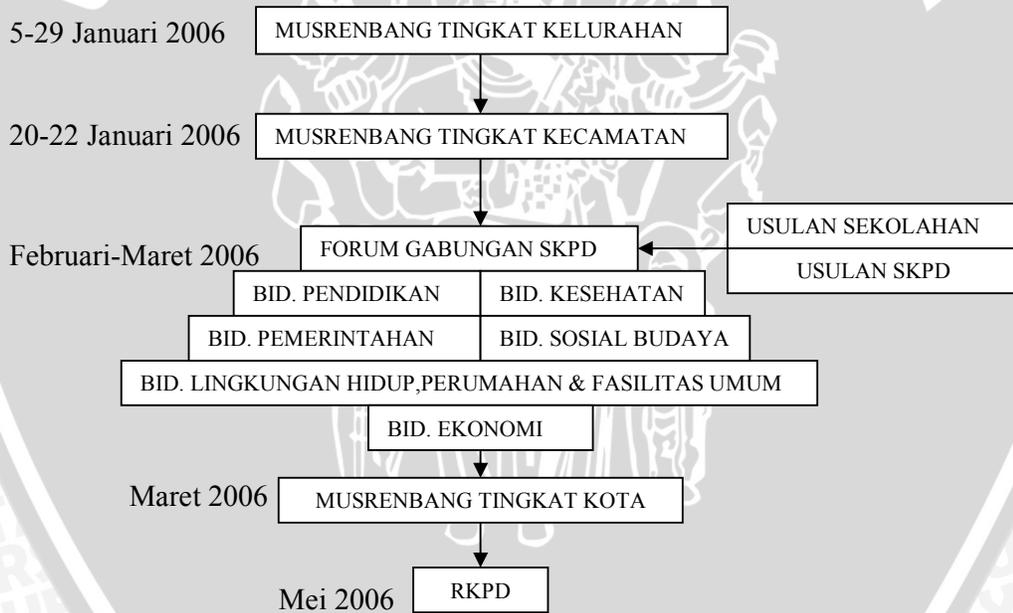
Untuk proses penyusunan perencanaan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berisi prioritas pembangunan, pagu indikatif berdasarkan fungsi (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD, sumber dana dan wilayah kerja dan renstra SKPD dalam hal ini adalah renstra Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri yang tetap mengacu pada RPJMD. Rancangan Awal RKPD ini di bawa ke musrenbang tingkat desa/kelurahan dan musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dari musrenbang tingkat kecamatan di bawa ke forum SKPD terlebih dahulu sebelum melakukan musrenbang tingkat kota/daerah. Kemudian Rancangan Awal RKPD ini akan menjadi Rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD. Rancangan Renja SKPD ini disusun berdasarkan renstra SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Rancangan RKPD ini di dasarkan pada Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja SKPD. Rancangan RKPD ini akan di bawa ke forum SKPD dan musrenbang tingkat kota/daerah yang menghasilkan Rancangan Akhir RKPD untuk kemudian menjadi penetapan RKPD. Dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini sebenarnya tidak hanya berhenti pada musrenbang tingkat kota/daerah. Hasil dari musrenbang ini akan disesuaikan pada musrenbang tingkat provinsi seperti yang dikemukakan oleh staf Bappeko bagian tata usaha, Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini dimulai dengan penyusunan renstra Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya yang kemudian dibawa ke forum SKPD hasil dari musrenbang tingkat kecamatan yang kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kota/daerah. Di mana hasil dari musrenbang tingkat kota/ daerah ini akan disesuaikan pada musrenbang tingkat provinsi mengenai pengembangan

pariwisata tingkat provinsi. Kalau dianggap tidak sesuai maka usulan dari musrenbang tingkat kota/ daerah ini bisa di tolak”<sup>40</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut ini:

Gambar 5  
Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007



Sumber: Badan Perencanaan Kota Kediri, Tahun 2006

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbang Tingkat Kelurahan)

a. Peserta

<sup>40</sup> wawancara pada tanggal 08 April 2008 Pk. 09.00 WIB di ruang kerjanya

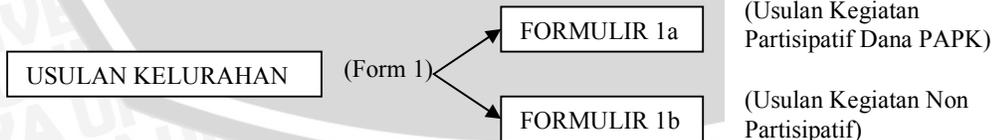
Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di kelurahan seperti: ketua RW, ketua RT, kepala dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat, ketua adat, tokoh agama, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, komite sekolah, dan lain-lain.

b. Nara sumber

Nara sumber adalah kepala kelurahan, ketua dan para anggota Forum Masyarakat Kelurahan (FMK), camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat/ petugas yang ada di kelurahan, dan LSM yang bekerja di kelurahan.

c. Keluaran (hasil musrenbang)

1. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kelurahan, serta kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN dan sumber lainnya.
2. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang kelurahan pada musrenbang kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
3. Berita acara.
- d. Penyusunan usulan kegiatan pada musrenbang tingkat kelurahan



FORMULIR 1a:

Membuat usulan-usulan kegiatan dari kelurahan yang bersifat partisipatif dengan kriteria:

1. Pelaksanaan kegiatan memakai teknologi sederhana
2. Biasanya berupa pembangunan sarana prasarana lingkungan
3. Jumlah dana usulan semua kegiatan dibatasi oleh Plafon Anggaran Per Kelurahan (PAPK)
4. Kegiatan diharapkan akan menstimulasi swadaya/ partisipasi masyarakat

FORMULIR 1b:

Membuat usulan-usulan kegiatan dari kelurahan non partisipatif dengan kriteria:

1. Usulan kegiatan bersifat umum yang belum *tercover* didalam forum 1a
2. Kegiatannya nanti akan dilaksanakan oleh SKPD terkait
3. Jumlah dana usulan semua kegiatan tidak dibatasi
4. Nomor urut usulan adalah peringkat prioritas

Musrenbang tingkat kelurahan merupakan suatu sistem penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kultur dan semangat gotong royong masyarakat desa. Musrenbang tingkat kelurahan ini dilaksanakan sekitar tanggal 5 – 29 Januari 2006. Sebagai mana yang diungkapkan oleh staff BAPPEKO bagian fisik dan prasarana, Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Musrenbang tingkat kelurahan ini masing-masing wakil dari kelurahan yang ada akan mengajukan usulan pembangunan yang mereka anggap perlu untuk mendapatkan bantuan pembangunan. Nantinya usulan pembangunana akan ditampung dan dipilih usulan mana yang benar-benar perlu untuk direalisasikan”<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

Dalam kegiatan musrenbang tingkat kelurahan ini memiliki beberapa keuntungan seperti yang diungkapkan oleh staff BAPPEKO bagian fisik dan prasarana, Beliau mengatakan bahwa, sasaran dari musrenbang tingkat kelurahan ini adalah: “

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat, sehingga mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode dan teknik perencanaan pembangunan partisipatif
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan kelurahan
3. Menghasilkan rencana/ usulan progam pembangunan kelurahan, yang akan dikelola masyarakat sendiri maupun yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kecamatan dan atau Pemerintah Kota
4. Mendorong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan”.<sup>42</sup>

Musrenbang tingkat kelurahan ini merupakan suatu tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dari bawah. Maka tujuan dari musrenbang tingkat kelurahan ini adalah:

1. Menentukan usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Mengarahkan usulan dari bawah agar usulan tersebut jelas dan tegas
3. Mendukung pada kelancaran proses musrenbang pada tingkat kecamatan

---

<sup>42</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

Sedangkan sumber pembiayaan dalam perencanaan pembangunan tingkat desa ini diperoleh dari:

3. Swadaya murni desa
3. APBD Kelurahan
3. APBN

Pada saat diadakan musrenbang tingkat kelurahan maka setiap kelurahan/desa akan melakukan musyawarah untuk menentukan setiap sektor pembangunan yang membutuhkan pembangunan. Hasil dari musrenbang tingkat kelurahan ini berupa beberapa usulan pembangunan yang telah di rangking sehingga menghasilkan skala prioritas usulan pembangunan dari desa/ kelurahan tersebut. Untuk bidang pariwisata yang akan menjadi prioritas perencanaan pembangunan adalah Kawasan Wisata Selomangleng dimana kawasan ini memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan obyek wisata lain yang ada di Kota Kediri. Disamping itu Kawasan Wisata Selomangleng ini menjadi primadona bagi masyarakat Kediri. Kemudian hasil dari musrenbang tingkat kelurahan ini akan ditandatangani oleh kepala desa/ lurah untuk kemudian dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut. Pada Musrenbang tingkat kelurahan ini peran BAPPEKO sudah mulai nampak tetapi hanya sebatas *monitoring*/mengawasi jalannya musrenbang tingkat kelurahan dan memberikan usulan-usulan jika diperlukan.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Tingkat Kecamatan)
  - a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari kelurahan yang dihasilkan dari musrenbang kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, pengurus asosiasi BPD kecamatan, LPMK kecamatan dan lain sebagainya).

b. Nara sumber

1. Dari Kota:

Bappeko, perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

2. Dari Kecamatan:

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/ professional yang dibutuhkan.

c. Keluaran (hasil musrenbang)

1. Daftar prioritas progam dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada musrenbang kota
2. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti musrenbang kecamatan.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD sesuai dengan fungsi SKPD dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
4. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan
5. Berita acara.

Pada musrenbang tingkat kecamatan ini dilakukan pembahasan tentang perencanaan pembangunan tingkat kecamatan untuk tahun anggaran yang akan berjalan. Musrenbang tingkat kecamatan ini akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 – 22 Januari 2006. Seperti yang dijelaskan oleh staff BAPPEKO bidang fisik dan prasarana, Beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi acuan pembahasan dalam musrenbang tingkat kecamatan adalah hasil musrenbang kelurahan, usulan progam yang langsung diusulkan oleh dinas-dinas atau instansi terkait”<sup>43</sup>

Dalam musrenbang tingkat kecamatan ini akan disampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat mengenai:

1. Kegiatan dan manfaat dari program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat
2. Progam pembangunan tingkat kecamatan yang sedang direncanakan
3. Perencanaan/ persiapan progam yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan dari diadakannya musrenbang tingkat kecamatan ini adalah:

1. Menginventarisasikan potensi dan masalah tingkat kecamatan
2. Merumuskan usulan pembangunan tingkat kecamatan
3. Menilai dan memadukan usulan-usulan perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa ke dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

Sedangkan sumber pembiayaan dalam musrenbang tingkat kecamatan ini diperoleh dari:

1. Swadaya masyarakat
2. APBD Kecamatan

---

<sup>43</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

### 3. APBN

Seperti halnya musrenbang tingkat kelurahan, dalam musrenbang tingkat kecamatan ini semua usulan pembangunan akan di ranking berdasarkan skala prioritas dari tingkat kecamatan untuk di bawa ke forum SKPD dan selanjutnya akan diajukan ke musrenbang tingkat Kota. Dalam musrenbang tingkat kecamatan ini peran BAPPEKO sudah mulai nampak. BAPPEKO berperan sebagai nara sumber yang berasal dari kota. Kemudian hasil dari musrenbang tingkat kecamatan ini akan ditandatangani oleh camat selaku kepala wilayah dan akan diserahkan pada forum gabungan SKPD untuk di bahas lebih lanjut.

### 3. Forum Gabungan SKPD

Sebelum melakukan musrenbang tingkat kota maka perlu dilakukan forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilaksanakan sekitar bulan Februari – Maret 2006. Pelaksanaan forum gabungan SKPD ini ditujukan untuk memantapkan pelaksanaan musrenbang tingkat kota dengan terlebih dahulu memantapkan semua usulan rencana program/ proyek hasil pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, usulan sekolah dan usulan SKPD. Seperti yang dijelaskan oleh staff BAPPEKO bagian fisik dan prasarana, Beliau mengatakan bahwa:

“Sesuai usulan tersebut maka dalam forum gabungan SKPD dilakukan pembahasan tentang keterpaduan usulan program dan proyek antar kelompok bidang pembangunan baik bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, bidang lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum serta bidang ekonomi”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

repository.ub.ac

Dalam forum gabungan SKPD ini akan dilakukan pembahasan untuk menyerasikan atau sinkronisasi mengenai:

1. Usulan progam hasil diskusi musrenbang tingkat kecamatan dengan usulan sekolahan dan usulan SKPD
2. Usulan program atau proyek dari masing-masing kelompok bidang pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, bidang lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum serta bidang ekonomi
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbang Tingkat Kota)

Setelah forum gabungan SKPD terselenggara maka pada bulan Maret 2006 diadakan musrenbang tingkat kota yang akan membahas seluruh usulan proyek yang diajukan oleh kecamatan maupun dinas/ instansi. Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kota tidak menunjukkan adanya pertentangan yang terjadi antar peserta musrenbang. Sesuai dengan tujuan dari musyawarah untuk mendapat kata sepakat dimana masing-masing dinas/ instansi mengutarakan prioritas progam dan anggaran dana yang diperlukan, kemudian dinas/ instansi lain mengutarakan pendapat mereka, apakah mereka setuju atau tidak. Yang pasti semua dinas/ instansi selalu berupaya untuk memperjuangkan prioritas progam mereka. Dalam musrenbang tingkat kota ini melibatkan DPRD yang akan mengkaji kesesuaian antara progam dan dana yang tersedia. Hasil dari musrenbang tingkat kota ini berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Dalam proses perencanaan dan penganggaran ini ternyata melibatkan banyak pihak tidak hanya dilakukan oleh BAPPEKO saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff BAPPEKO bagian fisik dan prasarana mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran, Beliau menjelaskan bahwa:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“Proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya melibatkan pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah daerah beserta *stake holdernya* seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, perguruan tinggi beserta pihak-pihak yang mempunyai kepedulian dan memiliki perhatian terhadap kemajuan dan perkembangan Kota Kediri”<sup>45</sup>

Setiap proses perencanaan dan penganggaran pastilah ada tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Seperti halnya yang disampaikan oleh staff BAPPEKO bagian fisik dan prasarana mengenai hasil yang dicapai dalam proses perencanaan dan penganggaran, Beliau mengatakan bahwa:

“Hasil-hasil yang dicapai dari penyusunan proses perencanaan dan penganggaran adalah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta prioritas pelaporan anggaran sementara dan Dokumen Kebijakan Anggaran”<sup>46</sup>

Dari uraian tersebut, bahwa dalam mekanisme proses perencanaan dan penganggaran Kota Kediri mempergunakan arus informasi satu arah yaitu *bootom – up* dimana masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui musyawarah pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan musrenbang tingkat kota). Berangkat dari keadaan yang demikian itu, disadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **b. Pertimbangan-Pertimbangan yang Dipakai BAPPEKO Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng**

### **a. Prioritas Pembangunan Nasional**

<sup>45</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

<sup>46</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan desa
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi
6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian masalah politik
7. Mitigasi dan penanggulangan bencana
8. Percepatan pembangunan infrastruktur
9. Pembangunan daerah perbatasan dan terisolasi

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional diatas yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng adalah pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor dimana kedua prioritas pembangunan nasional ini mempunyai hubungan yang terkait. Seperti yang dijelaskan oleh staf BAPPEKO bidang fisik dan prasarana, Beliau menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng diharapkan jumlah masyarakat miskin dapat dikurangi dengan cara membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar agar mereka turut aktif dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng melalui usaha perdagangan di sekitar kawasan wisata. Mereka dapat berjualan makanan, minuman, maupun cendera mata khas Kota Kediri. Dari hasil

penjualan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat”<sup>47</sup>

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengurangan subsidi pada Tahun 2005, mengakibatkan melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut mendorong kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi, baik dalam pendanaan maupun pelaksanaan program.

Upaya pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Hal ini harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu. Prioritas pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Unit Kerja terkait, dengan menggunakan dana APBN.

Program kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan diarahkan kepada keluarga miskin. Bagi keluarga miskin penganggur, setengah penganggur dan keluarga miskin pekerja. Program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat, khususnya bagi peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Melalui program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didukung alokasi anggaran yang memadai, pelaksanaan program yang terpadu dan komprehensif serta telah di dukung dengan data keluarga miskin yang akurat akan memberikan hasil yang nyata.

---

<sup>47</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

Mengenai peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.

Disamping masih tingginya jumlah pengangguran, permasalahan tenaga kerja yang menonjol adalah tingkat kesejahteraan tenaga kerja dengan upah kerja yang rendah, dimana jumlah tersebut belum dapat menghidupi keluarga secara layak.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan, didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas terutama yang digerakkan oleh sektor riil dan investasi dalam negeri.

Upaya pengurangan pengangguran seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. .

b. Prioritas Pembangunan Kota Kediri

1. Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi lokal
3. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
4. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan kota
6. Peningkatan pembinaan kepemudaan, olah raga, seni dan budaya daerah
7. Meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

8. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
9. Mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, melestarikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup, dan menata kawasan permukiman serta penataan ruang
10. Meningkatkan kualitas kesehatan dan keberhasilan lingkungan pemukiman dan perkotaan
11. Meningkatkan keadilan dan supremasi hukum

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Kediri yang telah disebutkan diatas yang mempunyai kerkaitan dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng adalah point 1, 2, 3, 6 dan 9. Yaitu, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pembinaan kepemudaan, olah raga, seni dan budaya daerah, mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, melestarikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup, dan menata kawasan permukiman serta penataan ruang. Seperti yang dijelaskan oleh staf BAPPEKO bidang fisik dan prasarana BAPPEKO, Beliau menjelaskan bahwa:

“Yang dipakai sebagai acuan dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng adalah point 1, 2, 3, 6 dan 9. Dimana kelima point tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Jadi tidak sumua

prioritas pembangunan Kota Kediri di jadikan acuan, hanya prioritas yang sesuai dan terkait saja yang akan dipakai”<sup>48</sup>

Berkaitan dengan prioritas pembangunan Kota Kediri mengenai mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Ketersediaan data penduduk miskin yang akurat dan operasional sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terutama program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan Kota Kediri, karena untuk menyalurkan bantuan guna pengentasan kemiskinan diperlukan data penduduk miskin baik jumlah maupun keberadaannya. Untuk memenuhi tersedianya data penduduk miskin tersebut Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk menindak lanjuti hasil Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB) dengan membentuk suatu tim terpadu dari Dinas Instansi yang terkait di Kota Kediri di bawah tanggung jawab BAPPEKO Kediri dan sebagai koordinator pelaksanaan pendataan lapang adalah BPS Kota Kediri bersama Dinas Kesejahteraan Sosial dan KB Kota Kediri.

Pelaksanaan Lapang Pendataan Kemiskinan Terpadu di Kota Kediri pada bulan September-Oktober 2005 memperoleh jumlah keluarga miskin sebanyak 11.550 KK, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2004 yang mencapai 13.557 KK, atau sebesar negatif 14,80 persen. Jumlah keluarga miskin pada tahun 2005 ini hampir sama dengan tahun 2003 yang mencapai 11.349 KK. Penurunan jumlah keluarga miskin pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004 ini disebabkan oleh adanya peningkatan status miskin menjadi tidak miskin.

---

<sup>48</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

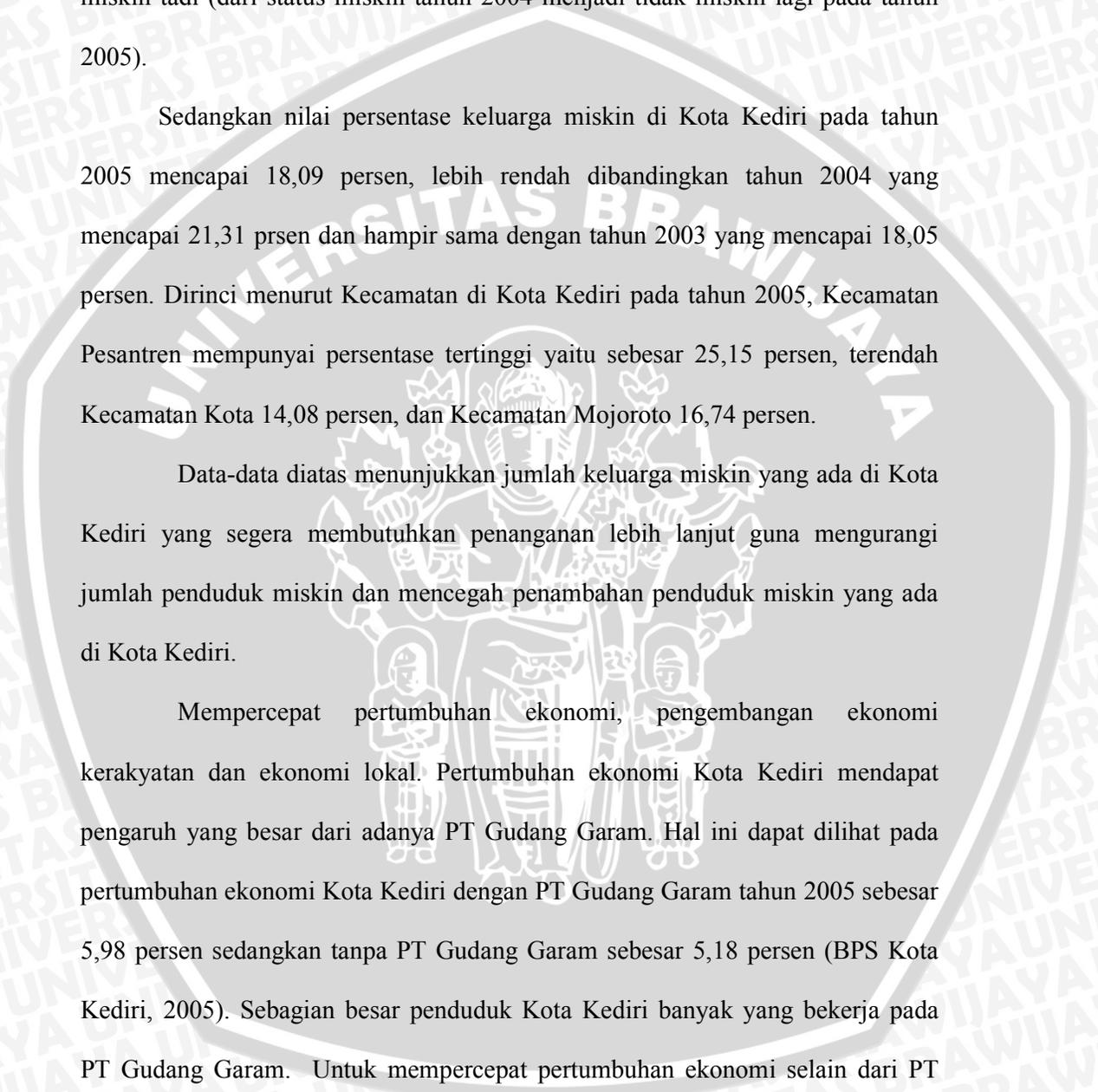
repository.ub.ac

Pada pelaksanaan Pendataan Kemiskinan Terpadu yang dilakukan pada tahun 2005 ini juga ditemukan penurunan status yaitu adanya keluarga miskin baru yang berarti terjadi penambahan jumlah kemiskinan. Penambahan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan adanya peningkatan jumlah keluarga yang tidak miskin tadi (dari status miskin tahun 2004 menjadi tidak miskin lagi pada tahun 2005).

Sedangkan nilai persentase keluarga miskin di Kota Kediri pada tahun 2005 mencapai 18,09 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 21,31 persen dan hampir sama dengan tahun 2003 yang mencapai 18,05 persen. Dirinci menurut Kecamatan di Kota Kediri pada tahun 2005, Kecamatan Pesantren mempunyai persentase tertinggi yaitu sebesar 25,15 persen, terendah Kecamatan Kota 14,08 persen, dan Kecamatan Mojoagung 16,74 persen.

Data-data diatas menunjukkan jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Kediri yang segera membutuhkan penanganan lebih lanjut guna mengurangi jumlah penduduk miskin dan mencegah penambahan penduduk miskin yang ada di Kota Kediri.

Mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mendapat pengaruh yang besar dari adanya PT Gudang Garam. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dengan PT Gudang Garam tahun 2005 sebesar 5,98 persen sedangkan tanpa PT Gudang Garam sebesar 5,18 persen (BPS Kota Kediri, 2005). Sebagian besar penduduk Kota Kediri banyak yang bekerja pada PT Gudang Garam. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi selain dari PT Gudang Garam Pemerintah Kota Kediri berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama bagi masyarakat sekitar kawasan wisata dan masyarakat yang keadaan ekonominya di



bawah rata-rata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mendayagunakan industri pariwisata dalam meningkatkan penyerapan wisatawan sebagai sarana pendapatan daerah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga jumlah masyarakat miskin dapat di kurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata yang telah dikembangkan akan tampak jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat pada desa-desa sekitar lokasi wisata yang belum dikembangkan. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah biasanya berasal dari retribusi parkir dan karcis masuk kawasan wisata.

Berikutnya mengenai memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tujuan akhir dari pembangunan ketenagakerjaan adalah perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri, untuk memperoleh gambaran yang mencerminkan informasi dari tujuan yang dimaksud, perlu disusun statistik ketenagakerjaan, karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jika dilihat dari perkembangannya, TPAK pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 2,73 persen, diduga penurunan ini disebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan akibat terbatasnya lowongan pekerjaan yang ada, disamping terjadinya pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan di Kota Kediri. Berikut ini tabel persentase TPAK, TKK, dan TPT Kota Kediri Tahun 2003-2005.

Tabel 4  
Persentase TPAK, TKK, dan TPT Kota Kediri Tahun 2003-2005

Tahun	TPT	TKK	TPT
-------	-----	-----	-----

1	2	3	4
2003	60,78	91,64	8,36
2004	64,66	86,76	13,24
2005	61,93	86,23	13,77
Penduduk $\geq$ 10 Tahun = 214.428			

Sumber: BPS Kota Kediri, Tahun 2005

Untuk prioritas mengenai peningkatan pembinaan kepemudaan, olah raga, seni dan budaya daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan, dan usaha-usaha lainnya guna ikut serta memelihara, memperkenalkan dan mengembangkan budaya dengan tetap menjaga kepribadian dan martabat bangsa. Sedangkan prioritas untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, melestarikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup, dan menata kawasan permukiman serta penataan ruang maksudnya adalah bilamana lingkungan hidupnya baik dan memberikan alam kehidupan yang asri, sehat dan nyaman maka manusia secara keseluruhan akan merasakan manfaatnya, demikian sebaliknya. Berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng sebagai tindak lanjut Rencana Tata Ruang Kota Kediri, mengingat kawasan ini merupakan potensi yang perlu dicermati dan dikembangkan maka diharapkan pengembangan ini akan memberikan nilai bagi sekitarnya serta memberikan citra bagi Kota Kediri.

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Kediri yang telah disebutkan diatas merupakan bahan pertimbangan yang di pakai oleh BAPPEKO dalam rangka perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh staff BAPPEKO bidang fisik dan prasarana yang mengatakan bahwa:

“Pertimbangan – pertimbangan yang dipakai BAPPEKO dalam perencanaan pengembangan Wisata Selomangleng yaitu dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai

prioritas pembangunan Kota Kediri, disamping itu Kawasan Wisata Selomangleng juga memiliki potensi wisata budaya dan wisata alam”<sup>49</sup>

### **c. Strategi-strategi yang Dilakukan BAPPEKO Dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng**

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Kediri di jelaskan bahwa strategi-strategi yang di pakai oleh BAPPEKO yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri dalam rangka perencanaan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengembangan Potensi dan Produk Wisata**

Dalam rangka mendukung progam Kota Kediri sebagai kota perdagangan, jasa, pendidikan dan pariwisata maka strategi pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan semua potensi obyek, sejarah, agama, dan budaya yang ada di Kota Kediri.
2. Mengembangkan obyek wisata buatan sebagai obyek wisata baru yang potensial sebagai tempat kunjungan wisata
3. Pemberdayaan pengembangan potensi Seni Budaya dan kerajinan daerah, melalui kegiatan festival dan pameran.
4. Memperluas kerjasama dengan pihak III menyangkut investasi pengelolaan obyek/ kawasan wisata

#### **b. Fasilitas dan Sarana Prasarana Pendukung**

Strategi pengembangan pariwisata diarahkan pada:

1. Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi - menuju kawasan dan tempat wisata

---

<sup>49</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

2. Mencari dan membuat jalan tembus / alternatif menuju Kawasan Wisata Selomangleng
3. Pembangunan dan penataan kawasan wisata yang meliputi pos penjagaan (keamanan), lahan parkir, warung atau toko, musholla, toilet, tiket, sarana kebersihan, keamanan dan kenyamanan pengunjung.
4. Penyediaan utilitas yang meliputi jaringan listrik, air bersih, telpon, irigasi dan drainase.

c. Pelayanan Umum dan SDM

Konsep pelayanan dan SDM ini diarahkan pada:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan publik dan pengelolaan obyek wisata.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum yang meliputi perizinan dan pembinaan usaha jasa pariwisata dan pelaku seni budaya
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan obyek dan pengisian *event* / kegiatan
4. Meningkatkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan daerah
5. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka kerjasama dengan pengusaha jasa pariwisata

d. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Strategi promosi dan pemasaran diarahkan pada peluang pengembangan pasar yang meliputi:

1. Mendirikan pusat informasi wisata di Kota Kediri. Lokasi hendaknya mudah dilihat dan mudah ditemukan oleh wisatawan. Selain itu dapat pula

dikembangkan pusat informasi untuk kota Kediri pada lokasi wisata yang telah berkembang seperti Kawasan Wisata Selomangleng. Obyek wisata yang pertama kali dipasarkan hendaknya mempunyai ciri khas dan menjadi prioritas pengembangan. Dalam pemasaran ini hendaknya dimuat kekhasan daya tarik obyek, cara pencapaian, sarana dan prasarana penunjang obyek.

2. Membuat buku informasi wisata, brosur perjalanan, ataupun poster-poster untuk obyek wisata beserta peta lokasinya.
3. Pengembangan rute-rute perjalanan yang disebarkan pada agen-agen perjalanan.
4. Membangkitkan rasa cinta tanah air dan cinta wisata pada masyarakat melalui kemudahan-kemudahan.
5. Pengadaan kendaraan wisata yang khusus melayani perjalanan ke obyek wisata.

#### **4. Faktor Penghambat dan Solusi Yang Dilakukan BAPPEKO dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng**

- a. Faktor Penghambat dalam pengembangan kawasan wisata selomangleng

Faktor dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dana merupakan masalah pokok dalam setiap usaha perencanaan pengembangan. Apapun jenis pengembangan itu pastilah memerlukan biaya atau dana baik itu sedikit atau banyak. Dana merupakan faktor terpenting dalam usaha perencanaan pengembangan. Masalah dana menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah Kota Kediri dalam rangka mengembangkan Kawasan Wisata Selomangleng, dimana alternatif pemecahan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengembangan secara bertahap.

Dana merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah perencanaan pengembangan. Kesuksesan suatu program sangat ditentukan oleh ada tidaknya dana yang tersedia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh staff BAPPEKO bidang fisik dan prasarana, dimana Beliau mengatakan bahwa:

“ Dalam perencanaan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng dana merupakan masalah yang utama dan bukan merupakan hal yang baru. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kediri maka pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng tidak bisa berjalan cepat karena anggaran dari APBD Kota Kediri tidak hanya digunakan untuk pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng saja, karena obyek wisata lainnya juga memerlukan dana guna pengembangan obyek wisata tersebut. Selain itu hambatan lainnya adalah belum adanya kerjasama pengembangan pariwisata yang terpadu antar daerah”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas, alternatif yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan dana yang ada adalah dengan melakukan pembangunan secara bertahap.

Dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini dana berasal dari retribusi pengunjung dan dana APBD. Besarnya retribusi untuk pengunjung Kawasan Wisata Selomangleng di dasarkan pada Perda No 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Berikut ini struktur dan besarnya tarif retribusi:

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan atas pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.

---

<sup>50</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) Perda No 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian tempat rekreasi pada Kawasan Wisata Gua Selomangleng:

1. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi, kecuali obyek khusus yang ada di dalamnya, terdiri dari:

a. Dewasa sebesar RP 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang;

b. Untuk anak-anak sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap anak.

2. Setiap pemakaian panggung pentas kesenian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

a. Setiap pemakaian kamar mandi terdiri dari:

1. Untuk mandi sebesar Rp 1.000, 00 (seribu rupiah);

2. Untuk peturasan sebesar Rp 500, 00 (lima ratus rupiah).

b. Pemakaian tempat rekreasi di lokasi kolam renang pada Kawasan Wisata Gua Selomangleng:

1. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi kecuali obyek khusus yang ada di dalamnya besaran retribusi ditetapkan:

a. Dewasa sebesar Rp 3.000, 00 (tiga ribu rupiah) setiap orang;

b. Anak-anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap anak

2. Penggunaan obyek khusus berupa mainan anak-anak atau sejenisnya besar retribusi ditetapkan dengan keputusan walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

c. Untuk setiap kali masuk kawasan tempat rekreasi pada obyek khusus:

1. Museum Airlangga besaran retribusi ditetapkan:

- a. Dewasa sebesar Rp 1.000, 00 (seribu rupiah) setiap orang;
  - b. Anak-anak sebesar Rp 500, 00 (lima ratus rupiah) setiap anak kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan.
2. Pendakian Gunung Maskumambang besaran retribusi ditetapkan:
- a. Dewasa sebesar Rp 500, 00 (lima ratus rupiah) setiap orang;
  - b. Anak-anak sebesar Rp 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap anak kecuali pelajar berseragam sekolah untuk kepentingan pendidikan:
- d. Pengadaan dan pengelolaan mainan anak-anak dan sejenisnya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sepanjang memberikan keuntungan kepada semua pihak.
- e. Pemakaian tempat perdagangan pada Kawasan Wisata Gua Selomangleng:
1. Untuk kios permanen setiap m<sup>2</sup> sebesar Rp 200, 00 (dua ratus rupiah) sehari;
  2. Untuk kios darurat setiap m<sup>2</sup> sebesar Rp 100, 00 (seratus rupiah) sehari.
- f. Untuk tempat parkir pada Kawasan Wisata Gua Selomangleng
- c. Sepeda sebesar Rp 200, 00 (dua ratus rupiah) setiap parkir;
  - d. Sepeda motor sebesar Rp 500, 00 (lima ratus rupiah) setiap parkir;
  - e. Mobil roda empat sebesar Rp 1.000, 00 (seribu rupiah) setiap parkir;
  - f. Truk, bus mini dan kendaraan sejenis lainnya sebesar Rp 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap parkir;
  - g. Bus sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah) setiap parkir.

Penetapan besaran tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak dan atau belum termasuk premi asuransi kecelakaan.

Berdasarkan data diatas retribusi pengunjung Kawasan Wisata Selomangleng besarnya bisa berubah sewaktu-waktu seperti yang dijelaskan oleh bagian Kasir Retribusi Kawasan Wisata Selomangleng Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Beliau menjelaskan bahwa:

“Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga ini besarnya bisa saja berubah tidak lagi sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2004. Penarikan retribusi pengunjung tersebut dapat berubah jumlahnya kalau di Kawasan Wisata Selomangleng mengadakan *event-event* tertentu. Misalnya: adanya event dangdut, wayang, kesenian jaranan, lomba menggambar tingkat anak-anak, dan lain-lain. Jumlah perubahan retribusi terhadap pengunjung ini tidak dapat ditentukan pasti besarnya, tergantung pada *event* apa yang sedang berlangsung di Kawasan Wisata Selomangleng tersebut”<sup>51</sup>

Untuk rincian dana pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng yang berasal dari macam-macam retribusi dan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5  
Dana Pengembangan Kawasan Wisata Gua Selomangleng  
Tahun Anggaran 2006

No.	Uraian	Jumlah
1.	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan Retribusi kios/ bedak Kawasan Wisata Selomangleng	Rp. 5.893.600,00
2.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Retribusi parkir Kawasan Wisata Selomangleng	Rp. 4.128.000,00
3.	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi pengunjung dewasa Retribusi pengunjung anak-anak Retribusi pengunjung Museum Airlangga	Rp. 35.520.000,00 Rp. 5.760.000,00 Rp. 1.920.000,00

<sup>51</sup> wawancara pada tanggal 14 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerja

	Retribusi pendakian	Rp. 1.120.000,00
	Retribusi pengunjung kolam renang	Rp. 106.880.000,00
4.	Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Ganti rugi kios kawasan Gua Selomangleng	Rp. 3.360.000,00
	MCK. Pariwisata di Kawasan Wisata Selomangleng	Rp. 1.833.500,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp. 166.415.100,00</b>
5.	<b>APBD Tahun Anggaran 2006</b>	<b>Rp. 663.000.000,00</b>
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>Rp. 829.415.100,00</b>

Sumber: Badan Perencanaan Kota Kediri, Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng dana pengembangan berasal dari berbagai macam retribusi pengunjung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri. Seperti yang dijelaskan oleh staf Bappeko bidang sosial, ekonomi dan budaya, Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini dananya murni berasal dari Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk retribusi pengunjung dan APBD Kota Kediri. Tidak ada dana yang berasal dari sponsor seperti Gudang Garam atau Djarum. Semua dana pengembangan ditanggung oleh Pemerintah Kota Kediri. Makanya Pemerintah Kota Kediri sering mengalami kekurangan dana akibat terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah”<sup>52</sup>

b. Obyek Wisata yang Ada di Kawasan Wisata Selomangleng

Kawasan Wisata Selomangleng merupakan salah satu andalan obyek wisata yang ada di Kota Kediri. Kelebihan yang dimiliki oleh Kawasan Wisata Selomangleng yang tidak dimiliki oleh obyek wisata lainnya adalah menyangkut keindahan dan kesejukannya dimana banyak terdapat bukit dan pepohonan yang rindang di sekitar kawasan. Ada beberapa daya tarik yang dimiliki oleh Kawasan Wisata Selomangleng dimana daya tarik tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Jenis

<sup>52</sup> wawancara pada tanggal 08 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerja

dan kondisi obyek wisata yang mendukung pengembangan Kawasan Wisata

Selomangleng ini antara lain:

c. Obyek Wisata Alam

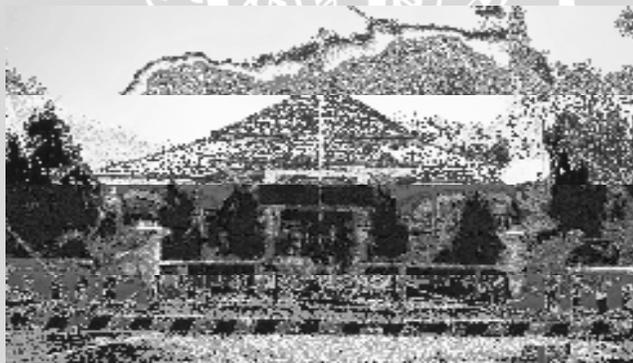
Dari segi wisata alam, Kawasan Wisata Selomangleng mempunyai cukup banyak daya tarik berupa pegunungan dengan segala keindahan panorama alamnya yang dapat diberikan kepada wisatawan yang berkunjung. Hal ini dapat menjadi asset yang besar dalam rangka pengembangan yang dilakukan terhadap Kawasan Wisata Selomangleng.

d. Obyek Wisata Budaya

a. Museum Airlangga

Gambar 6

Museum Airlangga Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri,

Tahun 2006

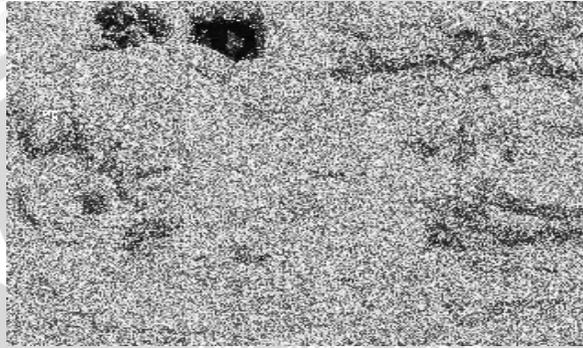
Museum Airlangga terletak di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoarjo.

Merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Museum Airlangga tempat menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Kediri. Terdapat banyak situs purbakala yang menjadi koleksi. Pada bagian luar bangunan Museum Airlangga menjadi satu dengan Kantor Dinas Pariwisata Kota Kediri.

## b. Gua Selomangleng

Gambar 7

Gua Selomangleng Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2006

Gua Selomangleng merupakan peninggalan sejarah. Merupakan obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Gua Selomangleng berupa gua dengan 2 pintu masuk dan dari pintu satu ke lainnya saling tembus. Dengan tinggi pintu gua  $\pm 3$  meter dan kedalaman masuk  $\pm 4$  meter. Berada di lereng Gunung Maskumambang.

Sebagai salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng, maka untuk menuju ke lokasi semua kendaraan harus parkir di halaman parkir yang ada, dan ke lokasi Gua Selomangleng dengan berjalan kaki. Dengan jarak  $\pm 150$  meter dari lokasi parkir. Pada lokasi depan gua kondisi jalannya terbuat dari batu semen permanent ( $\pm 50$  meter).

c. Makam Kuno Mbah Bancolono

Gambar 8

Makam Kuno Mbah Bancolono di Lihat dari Bawah Bukit



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri Tahun 2006

Makam Kuno Mbah Bancolono merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Makam Kuno Mbah Bancolono adalah makam yang dipercayai masyarakat sekitarnya sebagai manusia yang pertama membangun daerah tersebut. Lokasi makam berada diatas bukit. Pengunjung yang datang selain untuk berziarah ada juga yang datang dengan maksud-maksud lain seperti ingin melihat pemandangan indah dan beritual dilokasi makam.

Pengunjung yang datang harus naik bukit dengan tangga yang terbuat dari batu semen permanent dan lebar 2 meter dengan dibatasi pipa besi untuk memisahkan jalur naik dan jalur turun. Dengan kemiringan  $30^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  dan jarak dari bawah (jalan aspal) ke lokasi makam  $\pm 300$  meter. Karena lokasi Makam Kuno Mbah Bancolono berada diatas bukit, maka pemandangan (*view*) Kota Kediri dapat terlihat indah dari atas bukit tersebut.

d. Pura Sekartaji

Gambar 9

Pura Sekartaji Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri

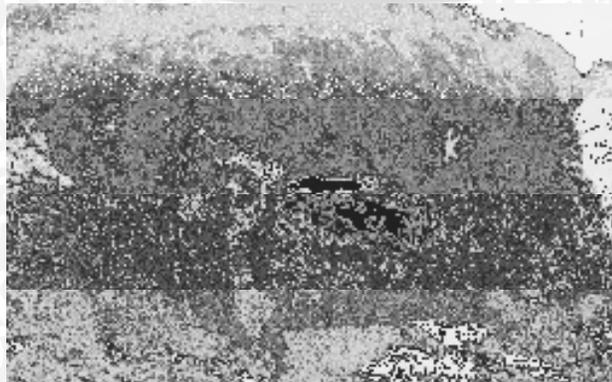
Tahun 2006

Pura Sekartaji merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Pura Sekartaji adalah tempat beribadah bagi pemeluk Agama Hindu. Lokasinya berada tepat di samping/ disebelah timur Museum Airlangga. Pura Sekartaji sering kedatangan tamu dari Pulau Bali. Dimana sebagian Masyarakat Pulau Bali yang beragama Hindu yang datang ke Kawasan Wisata Selomangleng bertujuan untuk beribadah di Pura Sekartaji. Masyarakat dari Pulau Bali yang datang beranggapan bahwa pusat peradapan agama hindu yang ada di Kota Kediri merupakan pusat peradaban Agama Hindu di Pulau Bali jika ditinjau berdasarkan sejarah yang ada.

e. Gua Padedean

Gambar 10

Gua Padedean Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2006

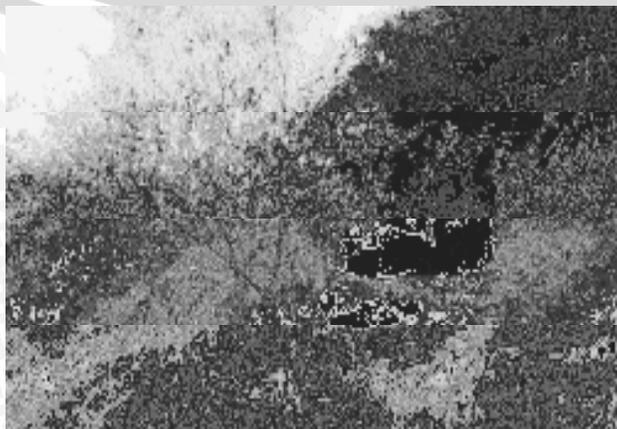
Merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Gua Padedean berupa gua dengan tinggi pintu gua  $\pm 2$  meter dan kedalaman masuk  $\pm 2$  meter. Berada di lereng Gunung Maskumambang. Menghadap ke arah timur sehingga pada pagi hari mengarah ke terbitnya matahari. Pada jalan menuju ke lokasi gua (25 meter sebelum lokasi Gua Padedean), kondisi jalannya agak sulit karena harus melewati jalan tanah dengan kemiringan  $45^\circ$ .

Untuk menuju ke lokasi Gua Padedean, wisatawan harus berjalan ke arah barat  $\pm 2$  km dari pusat kegiatan yang ada di Kawasan Wisata Selomangleng. Dengan kondisi jalan dari jalan aspal Kawasan Wisata Selomangleng ke Gua Padedean berupa jalan tanah yang melewati tanah tegalan. Dimana lebar jalannya  $\pm 2$  meter dengan medan cukup sulit. Karena kontur jalannya menanjak dengan kondisi alam dikanan dan kirinya jarang terdapat tanaman pepohonan yang rindang, maka wisatawan harus membawa makanan dan minuman sebagai perbekalan untuk diri sendiri.

f. Gua Selobale

Gambar 11

Gua Selobale Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2006

Gua Selobale merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Gua Selobale berupa gua dengan tinggi pintu gua  $\pm 2,5$  meter dan kedalaman masuk  $\pm 2,5$  meter. Berada di lereng Gunung Klotok menghadap ke arah timur, sehingga pada pagi hari mengarah ke terbitnya matahari. Untuk menuju ke lokasi Gua Selobale wisatawan harus berjalan ke arah barat  $\pm 2,5$  km dari pusat kegiatan yang ada di Kawasan Wisata Gua Selomangleng.

g. Gunung Klotok

Gambar 12

Gunung Klotok di Lihat dari Jalan Mastrip Menuju ke Arah Lokasi



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2006

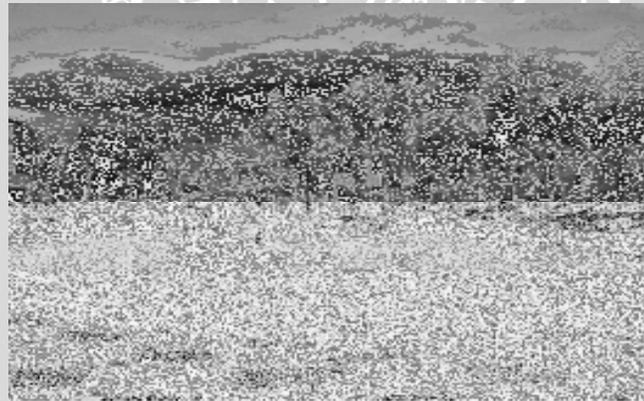
Gunung Klotok terletak di ujung sebelah barat kota Kediri. Merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Untuk

Gunung Klotok sebelah timur yang menghadap Kota Kediri masuk pada wilayah administrasi Kota Kediri. Sedangkan sebelah barat masuk wilayah administrasi Kabupaten Kediri. Obyek wisata Gunung Klotok merupakan obyek wisata pegunungan yang menghadap Kota Kediri. Seluruh wilayah Kota Kediri dapat dilihat dari atas Gunung Klotok. Hanya saja akses jalan ke lokasi tidak bisa ditempuh dengan menggunakan segala jenis kendaraan. Berupa pegunungan dengan tanah yang tandus, karena banyak pohon-pohon yang ditebang dan terbakar.

e. Obyek Wisata Minat Khusus Taman Wisata Selomangleng

Gambar 13

Kolam Renang Dalam Taman Wisata Selomangleng Tampak dari Depan



Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2007

Taman Wisata Selomangleng merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Selomangleng. Taman Wisata Selomangleng terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya kolam renang, panggung terbuka dan areal bermain anak. Dengan kondisi seluruh lahan kawasan Taman Wisata Selomangleng dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 3 meter. Taman Wisata

Selomangleng ini terdapat di sebelah depan Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri.

#### 5. Potensi Pariwisata Kota Kediri

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Kediri terdapat berbagai jenis potensi obyek wisata yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Potensi wisata tersebut meliputi obyek wisata alam, obyek wisata budaya, dan obyek wisata minat khusus yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6  
Potensi Pariwisata Kota Kediri

No.	Jenis/ Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	<b>Obyek Wisata Alam:</b>	
	a. Kawasan Wisata Selomangleng	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto
	b. Dermaga joyoboyo	Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto
	c. Sumber Bulus	Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren
	d. Sumber Cakarsi	Kelurahan Tepungrejo Kecamatan Pesantren
2.	<b>Obyek Wisata Budaya:</b>	
	a. Museum Airlangga	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto
	b. Gua Selomangleng	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto
	c. Makam Kuno Mbah Bancolono	Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto
	d. Gua Padedean	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto
	e. Gua Selobale	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto
	f. Gunung Klotok	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto

g. Kompleks Makam Islam Kuno Mbah Wasil	Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota
h. Masjid Aulia Setono Gedong	Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota
i. Makam Sunan Gesang	Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota
j. Masjid Agung Kota Kediri	Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota
k. Gereja Merah	Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto
l. Gereja Vicencius	Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto
m. Pura Sekartaji	Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto
n. Klenteng Tri Dharma	Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota
3. <b>Obyek Wisata Minat Khusus:</b>	
a. Taman Wisata Selomangleng	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto
b. Pabrik Rokok Gudang Garam	Kelurahan Semampir Kecamatan Kota
c. Taman Sekartaji	Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto
d. Taman Alun-alun Kota Kediri	Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota
e. Soto Bok Ijo	Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto

Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri, Tahun 2006

#### a. Upaya BAPPEKO Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng BAPPEKO Kota Kediri menemui hambatan berupa terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, adanya hambatan tersebut perlu disikapi mengingat hal tersebut sangat mengganggu dalam proses perencanaan pengembangan selanjutnya. Berdasarkan

hasil wawancara dengan staff BAPPEKO bidang fisik dan prasarana yang menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- a. “Dengan melakukan upaya membuat usulan perencanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- e. Dengan mengupayakan kemungkinan adanya kerjasama terkait pengelolaan kawasan Selomangleng misal, dengan pihak swasta atau lembaga pemilik modal lain tetapi tetap dengan mengedepankan wujud kerjasama tersebut sedapat mungkin lebih menguntungkan Pemerintah Kota Kediri.
- f. Upaya kerjasama di bidang pariwisata dengan daerah lain dalam rangka membentuk pariwisata yang terkoordinir, terpadu dan saling mendukung”<sup>53</sup>

Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas selama ini sudah mulai dilaksanakan namun belum semuanya menampakkan hasil seperti yang diharapkan karena semua itu masih dalam proses pelaksanaan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh staf BAPPEKO bidang fisik dan prasarana, Beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk usulan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sudah mulai menampakkan hasil yaitu semakin mudahnya akses jalan menuju Kawasan Wisata Selomangleng dan obyek-obyek wisata yang ada di kawasan wisata tersebut, yang dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Sedangkan upaya kerjasama dengan pihak swasta belum menampakkan hasil karena BAPPEKO masih berupaya untuk mencari

---

<sup>53</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

mitra swasta yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Sedangkan upaya yang terakhir ini masih dalam proses perencanaan, yaitu akan dibentuknya kawasan pariwisata daerah selatan yang meliputi Malang, Batu, Kediri, Blitar, Tulungagung dan kota-kota sekitarnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur<sup>54</sup>

### **C. Kaitan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Kota Kediri Dengan Peningkatan PAD**

Upaya pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan PAD bukannya tanpa kendala. Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah pada masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun pada segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah menjadi salah satu andalan setiap daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Wisata Selomangleng yang terus meningkat membuat Pemerintah Kota Kediri mengandalkannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut data jumlah pengunjung yang datang ke Kawasan Wisata Selomangleng.

Tabel 7

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Wisata Selomangleng  
Tahun 2002-2006

---

<sup>54</sup> wawancara pada tanggal 07 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2002	23.989
2	2003	29.270
3	2004	32.800
4	2005	33.225
5	2006	40.623

Sumber: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada Hari Minggu, liburan sekolah dan hari – hari libur nasional. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai berikut:

“Jumlah wisatawan ke Kawasan Wisata Selomangleng terbanyak terjadi pada saat Hari Minggu, liburan sekolah dan hari libur nasional. Karena sekarang ini yang lagi di gemari masyarakat Kediri adalah wisata alam yang pangsa pasarnya adalah semua kalangan. Dimana Kawasan Wisata Selomangleng tidak hanya memberikan wisata alam saja tetapi juga wisata budaya dan obyek wisata minat khusus. Data yang masuk hanya didasarkan pada hasil penjualan tiket kepada pengunjung kawasan ini”<sup>55</sup>

Pendapat Kepala Seksi Perencanaan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya ini juga dipertegas oleh bagian retribusi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya yaitu:

“Lonjakan pengunjung akan terjadi pada saat liburan terutama liburan sekolah dan liburan tahun baru. Peningkatan pengunjung Kawasan Wisata Selomangleng tampak pada peningkatan hasil penjualan tiket dari tahun ke tahun. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya selalu berusaha

<sup>55</sup> wawancara pada tanggal 10 April 2008 Pk 09.00 WIB di ruang kerjanya

untuk meningkatkan jumlah pengunjung guna memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri”<sup>56</sup>

Peningkatan jumlah pengunjung ini menjadi tugas Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri guna memenuhi target yang telah ditentukan oleh Kota Kediri. Target yang telah ditentukan ini menjadi pendorong bagi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya untuk selalu meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana Kawasan Wisata Selomangleng.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Sebelum Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng

Dalam pengembangan kawasan wisata selomangleng kota Kediri, PAD kota Kediri menunjukan peningkatan ini di sebabkan adanya pemasukan dari retribusi kawasan wisata selomangleng dalam PAD kota Kediri sebelum pengembangan telah terrealisasi ± Rp. 37.442.390 jumlah PAD ini ada dalam tabel perhitungan APBD pemerintah kota Kediri tahun anggaran 2004.

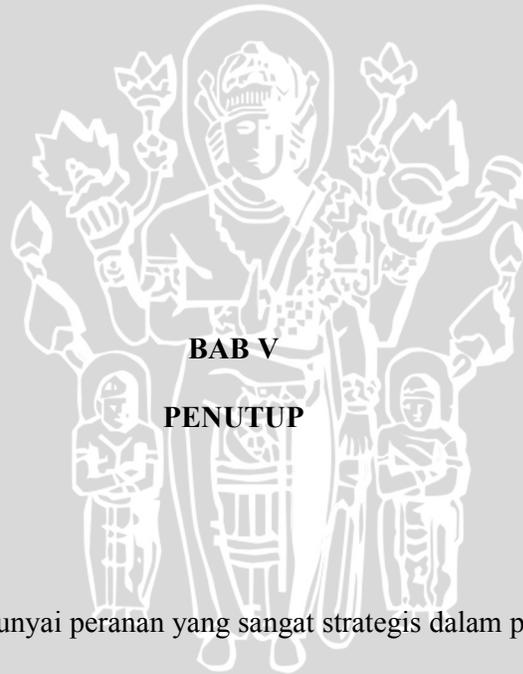
#### 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Setelah Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng.

Setelah pengembangan kawasan wisata selomangleng terlaksana dan adanya pemasukan dari retribusi dari kawasan wisata selomangleng yang sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga PAD kota Kediri pada tahun 2007 telah terrealisasi ± Rp. 40.135.033 jumlah PAD ini ada pada tabel perhitungan APBD pemerintah kota Kediri tahun anggaran 2007.

---

<sup>56</sup> wawancara pada tanggal 10 April 2008 Pk 09.30 WIB di ruang kerjanya

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. BAPPEKO mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng. Dimana BAPPEKO berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan rencana pembangunan antara instansi dan dinas terkait. Proses penyusunan perencanaan ini dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, Forum Gabungan SKPD, dan terakhir musrenbang tingkat kota. Hasil musrenbang dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota tersebut menghasilkan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didalamnya berisi program rencana kegiatan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng

2. Kota Kediri termasuk wilayah yang memiliki potensi wisata yang banyak dan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan. Potensi wisata yang paling banyak adalah wisata alam. Namun banyaknya potensi wisata ini belum memberikan kontribusi berarti bagi daerah karena belum dikembangkan dan belum dikomersilkan (belum dikenakan retribusi terhadap pengunjungnya).

### **B. Saran**

Sebaiknya BAPPEKO senantiasa menjalin koordinasi dengan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya dalam rangka perencanaan pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKPD oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya dalam hal:

1. Berusaha untuk terus menerus membenahi dan membangun Kawasan Wisata Selomangleng agar jauh menjadi lebih baik dari kondisi yang ada sekarang ini. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan bisa dibangun gapura masuk kawasan yang memberikan kesan indah kepada pengunjung pada saat pertama kali memasuki kawasan ini, pembuatan taman wisata dan untuk menjaga kebersihan bisa dengan cara menaruh bak-bak sampah di sekitar kawasan wisata supaya pengunjung tidak membuang sampah sembarangan sehingga kondisi lokasi wisata tetap terjaga kebersihannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya kota Kediri perlu meningkatkan pengelolaan terhadap potensi-potensi wisata yang belum dikomersilkan (belum dikenakan retribusi terhadap pengunjungnya) untuk menjadi obyek wisata yang layak dikomersilkan/ dikenakan retribusi terhadap para pengunjungnya agar dapat meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2004. *Kota Kediri dalam Angka 2003/2004 (Kota Kediri in Figures)*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

Badan Pusat Statistik. 2006. *Kota Kediri dalam Angka 2005/2006 (Kota Kediri in Figures)*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

Badan Pusat Statistik. 2007. *Kota Kediri dalam Angka 2006/2007 (Kota Kediri in Figures)*. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

Bryant, Coralie dan White Louis. 1999. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Djamin, Zulkarnain. 1984. *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sejak Pelita I)*. Jakarta: FEUI.

Fakultas Hukum. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukumi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya. 2007. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)*. Kediri: Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya.

Kartasasmita, G. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2002. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten atau Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Di Terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Riyadi dan Bratakusumah, Dedy Supryady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.

Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sondang, P. Siagian. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata di Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Konisius.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM-Press.

----- 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: UM-Press.

Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: CV Mandar Maju.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung

----- 1995. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Wahab, S. 1988. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Pramita.

➤ **Internet**

[www.kotakediri.go.id](http://www.kotakediri.go.id)

➤ **Peraturan Perundangan**

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 Tentang Pengembangan Kepariwisataaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1980 tentang Pembentukan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Tingkat Kota Kediri No. 4 Tahun 2003 tentang Struktur  
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Tingkat Kota Kediri No. 8 Tahun 2004 tentang Retribusi  
Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

SEB. 1181/M.PPN/02?2006. “SEB Petunjuk Teknis Penyelenggaraan  
Musrenbang Tahun 2006”, diakses pada Tanggal 14 September 2006 dari  
<http://www.bangda.depdagri.go.id/modules>.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## ABSTRAK

**Martha Yanu Rahmawan**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Mei 2008, *Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Oleh BAPPEKO Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Kediri* (Penelitian Di BAPPEKO kota kediri), **Dosen Pembimbing:**(1) Lutfi Effendi,SH.,MH. (2) Suko Raharjo,SH.

---

---

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk itu pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng ini maka BAPPEKO mempunyai peranan yang sangat penting terutama melalui perencanaan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pembangunan. Sehingga dengan adanya pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng di harapkan kawasan ini dapat menjadi salah satu andalan wisata Kota Kediri yang dapat menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki. Jadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan, dengan melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasikannya dan kemudian barulah diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa.Kawasan Wisata Selomangleng ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kediri melalui BAPPEKO yang berperan sebagai perencana berusaha mengembangkan wisata ini dengan membangun berbagai sarana, prasarana serta fasilitas yang dapat meningkatkan daya jual Kawasan Wisata Selomangleng. Diantaranya hal ini dilakukan dengan membangun kolam renang dan area tempat bermain anak.

Peningkatan jumlah pengunjung ini menjadi tugas Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kediri guna memenuhi target yang telah ditentukan oleh Kota Kediri. Target yang telah ditentukan ini menjadi pendorong bagi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya untuk selalu meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana Kawasan Wisata Selomangleng.